

**ANALISIS PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DI SMP NEGERI 3 MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Umi Nur Lailia

14170022



**JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

SEPTEMBER, 2018

**ANALISIS PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DI SMP NEGERI 3 MALANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd)

Oleh:

Umi Nur Lailia

14170022



**JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SEPTEMBER, 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI SMP NEGERI 3 MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

UMI NUR LAILIA

NIM: 14170022

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Diujikan

Pada tanggal, 01 Agustus 2018

Oleh

Dosen Pembimbing



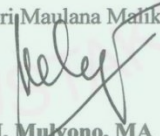
Agus Mukti Wibowo, M. Pd

NIP. 197807072008011021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang







Dr. H. Mukvono, MA

NIP. 196606262005011003

HALAMAN PENGESAHAN**ANALISIS PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI SMP NEGERI 3 MALANG****SKRIPSI**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Umi Nur Lailia (14170022)
telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 01 Agustus 2018 dan
dinyatakan
LULUS
serta diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Panitia Ujian	Tanda Tangan
Ketua Sidang H. Ahmad Sholeh, M.Ag NIP. 197608032006041001	: 
Sekretaris Sidang Agus Mukti Wibowo, M.Pd NIP. 197807072008011021	: 
Pembimbing Agus Mukti Wibowo, M.Pd NIP. 197807072008011021	: 
Penguji Utama Dr. Amin Nur M.Ag NIP. 197501232003121003	: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 19650817199803100

Agus Mukti Wibowo, M. Pd
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Umi Nur Lailia
Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Malang, 24 Juli 2018

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang
di
Malang

Assalamualaikum Wr. Wb

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Umi Nur Lailia
NIM : 14170022
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Skripsi : Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP
Negeri 3 Malang

maka selaku Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing



Agus Mukti Wibowo, M. Pd
NIP. 197807072008011021

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Malang, 23 Juli 2018
Yang membuat pernyataan,



Umi Nur Lailia
NIM. 14170022

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Karya ini hanya butiran kecil dari sekian banyak dan besar lautan pasir yang harus kupersembahkan demi kasih sayang kepada Ibundaku tercinta Ibu Murtiani yang telah banyak memberikan pengorbanan yang tidak terhingga nilainya baik materiil maupun spiritual, sehingga penulis bisa sampai ke jenjang Perguruan Tinggi Kedua kakak ku tercinta Achmad Junaidi. S dan Aang Mardian beserta istri dan anak-anaknya serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan nasihat, motivasi, dukungan, semangat serta doanya.

Kepada seluruh masayikh, guru-guruku yang telah memberikan ilmunya, semoga Allah membalas kebaikan beliau.

Teman sekaligus sahabat juga saudara Kisna, Ayu, Zida, Naim yang memberikan motivasi, semangat, pengorbanan serta perhatiannya kepadaku.

Kepada seseorang yang di siapkan Allah untuk menjadi partner dalam segala hal semoga dia yang terbaik bagiku, agamaku, dan keluargaku.

Sedulur-seduluri HIMMABA dan Teman-teman MPI 2014

Serta semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Terimakasih banyak untuk semuanya.

Akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk semua, orang-orang yang saya sayangi.

Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, serta berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Amiiiiiiiiinn.....

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri; dan barang siapa yang berbuat jahat, maka (dosanya) atas dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hamba-(Nya).

{Al-Fushilat : 46}



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W sebagai *agent of change* bagi umat manusia seluruh alam. Sang revolusioner jihad *Ad-Diin Al-Islam*.

Penelitian skripsi ini penulis susun untuk memenuhi tugas akhir dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada penelitian skripsi ini penulis menyajikan tentang **“Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Malang”**

Kami sampaikan ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang turut andil dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan dukungan dan bantuan dari semua pihak, oleh karena itu, dengan penuh ta'dhim, dari lubuk hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tuaku tercinta yang saya banggakan, dengan segenap keluarga yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya teriring doa dan motivasi, sehingga penulis selalu optimis dalam menggapai kesuksesan.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Agus Maimun, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Mulyono, MA selaku Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Agus Mukti Wibowo, M. Pd selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
7. Ibu Dra. Tutut Sri Wahyuni, M.M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Malang yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Ibu Dra. Ida Mutiawati selaku Bendahara SMP Negeri 3 Malang dan Ibu Siti yang telah berkenan membantu kelancaran terselesaikannya skripsi ini.
9. Bapak ibu guru serta staf SMP Negeri 3 Malang
10. Teman-teman jurusan Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2014 yang saling memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sedulur-seduluri HIMMABA yang mengajarkan arti kekeluargaan, keorganisasian serta selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
12. Sedulur Muhammad Khoirul Mukminin sebagai partner dalam segala hal.
13. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sadar bahwa yang ada dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi peneliti sendiri. Amiiiiinn.....

Malang, 23 Juli 2018

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	'	ء	=	'
ذ	=	dz	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

A. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

أو = aw

أي = ay

أو = û

إي = î

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan	6
D. Manfaat	6
E. Originalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah	13
G. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	
1. Tinjauan tentang Akuntabilitas	18
2. Tinjauan tentang Transparansi	23

3. Tinjauan tentang Bantuan Operasional Sekolah	27
B. Integrasi dalam Islam	32
C. Kerangka Berfikir.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Kehadiran Peneliti	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Data dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Analisis Data	43
G. Prosedur Penelitian.....	44

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data	47
1. Sejarah SMP Negeri 3 Malang.....	47
2. Visi Misi SMP Negeri 3 Malang.....	47
3. Tujuan SMP Negeri 3 Malang	48
4. Sasaran Sekolah	48
5. Tenaga Pendidik dan Kependidikan.....	49
6. Data Peserta Didik	51
7. Data Keuangan Dana BOS.....	52
B. Hasil Penelitian	55
1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS	56
2. Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana BOS	64
3. Temuan Hasil Penelitian	67

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 3 Malang.....	69
1. Perencanaan Dana BOS	70

2. Penggunaan Dana BOS	76
3. Pertanggungjawaban Dana BOS	79
4. Pengarsipan dokumen keuangan Dana BOS	85
5. Alasan dan Manfaat Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS	85
B. Analisis Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 3 Malang.....	87
1. Perencanaan Dana BOS secara terbuka	87
2. Penggunaan Dana BOS sesuai dengan Pos Anggaran	89
3. Publikasi Laporan Penggunaan Dana BOS	90
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Originalitas Penelitian.....	8
Tabel 3.1 : Kisi-kisi Observasi.....	38
Tabel 3.2 : Kisi-kisi Wawancara.....	39
Tabel 3.3 : Kisi-kisi Instrumen Dokumentasi.....	40
Tabel 4.1 : Nama Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah.....	51
Tabel 4.2 : Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah.....	51
Tabel 4.3 : Tenaga Kependidikan.....	52
Tabel 4.4 : Data Siswa.....	53
Tabel 4.5 : Penerimaan Dana.....	54
Tabel 4.6 : Perencanaan Anggaran Dana BOS.....	56
Tabel 4.7 : Realisasi Anggaran Dana BOS.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Kerangka Berfikir36



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Instrumen Wawancara
LAMPIRAN 2	Laporan Penggunaan Dana Bos Per-Triwulan
LAMPIRAN 3	Dokumentasi
LAMPIRAN 4	Bukti Konsultasi
LAMPIRAN 5	Surat-Surat Penelitian
LAMPIRAN 6	Biodata Mahasiswa



ABSTRAK

Lailia, Umi Nur. 2018. *Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Malang*. Skripsi, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Agus Mukti Wibowo, M.Pd.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan kebijakan dalam pengelolaan keuangan sekolah yang harus diterapkan setiap sekolah. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS sangat penting karena, dengan penerapan prinsip tersebut sekolah dapat dipercaya serta dapat meningkatkan partisipasi komponen sekolah. Untuk mencapai tujuan sekolah, maka diperlukan upaya yang lebih dari sekolah salah satunya adalah dengan pengelola keuangan dana BOS yang baik dan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dana BOS.

Tujuan Penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Malang, (2) untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Malang.

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif analisis dimana pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa narasumber diantaranya: Kepala Sekolah, Bendahara dan wali murid SMP Negeri 3 Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi berjalan cukup baik, yaitu adanya RKA-SKPD sebagai perencanaan dana BOS, kesesuaian penggunaan dana dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada sekolah dan pemerintah secara terbuka. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis penggunaan dana BOS.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Bos

ABSTRACT

Lailia, Umi Nur. 2018. Analysis of Accountability and Transparency the Management of School Operational Fund in Junior High School 3 Malang. Thesis, Department of Management Islamic Education, Faculty of Tarbiyah and Education University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor Thesis: Agus Mukti Wibowo, M.Pd.

Accountability and transparency are policies in management of school financial that must be implemented in every school. Accountability and transparency in the management of BOS fund is very important because, with the application of these principles, schools can be trusted, and can improve the participation of component schools. To achieve the goals of school, it is required more efforts from school, one of them is good management financial of BOS fund and applying the principles of accountability and transparency of BOS fund.

The purposes of this study are (1) to determine the application of the principle of accountability in the Management of School Operational Fund in Junior High School 3 Malang, (2) to find out the application of the principle of transparency in the Management of School Operational Fund in Junior High School 3 Malang

This research was conducted at Junior High School 3 Malang. The method used in this research is descriptive qualitative method where data collection used observation, interview and documentation techniques. In this study, the writer interviewed some informant including: Principal, Treasurer and the parent of students of Junior High School 3 Malang.

The result of the research showed that the implementation of accountability and transparency principles is going quite good, that is presence the RKA-SKPD as the planning of BOS fund, the suitability of the use of fund and technical guidance for the use of BOS fund with the realization, and the reporting and responsibility of BOS fund to schools and government openly. This fact showed that school has carried out the principle of accountability and transparency in the management of BOS fund in accordance with the government rules or technical guidelines for the use of BOS fund.

Keywords: Transparency, Accountability, Management of Boss Fund

مستخلص البحث

ليلية، أمي نور. ٢٠١٨. تحليل الأصول القابلية والشفافية في إدارة المساعدات المالية لتشغيل المدارس (BOS) بالمدرسة المتوسطة العامة الحكومية ٣ مالانج. البحث الجامعي، قسم إدارة التربية الإسلامية، كلية العلوم التربية والتعليم بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: أغوس موكتي ويووو، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الشفافية، القابلية، إدارة المساعدات المالية لتشغيل المدارس

القابلية والشفافية هي السياسة في الإدارة المالية للمدرسة التي تجب لكل مدرسة وتنفيذها. وكانت في إدارة المساعدات المالية لتشغيل المدارس (BOS) أمرا مهما في الغاية، لأن تطبيق مبادئها تمكن المدرسة في إيجاد وثيقة من جميع أصحاب المصلحة وتحسين جودتها. في الغاية، تحتاج الى بذل جهده الكبير من أجل تحقيق أهدافها المذكورة، منها الإدارة المالية الجيدة في المساعدات المالية لتشغيل المدارس وتطبيق أصول القابلية والشفافية فيها.

وكان الهدف من هذا البحث هو: (١) معرفة تطبيق أصول القابلية في إدارة المساعدات المالية لتشغيل المدارس (BOS) في تحسين جودتها في المدرسة المتوسطة العامة الحكومية ٣ مالانج، و (٢) معرفة تطبيق مبدأ الشفافية في إدارة المساعدات المالية لتشغيل المدارس (BOS) في تحسين جودتها في المدرسة المتوسطة العامة الحكومية ٣ مالانج.

هذا البحث يُبحث في المدرسة المتوسطة العامة الحكومية ٣ مالانج. واستخدمت الباحثة بالمنهج البحث الكيفي الوصفي، حيث تم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلة والوثائق. وقامت بالمقابلة مع بعض المشاركين؛ منها رئيس المدرسة، أمين الصندوق وأولياء الأمور.

وتتائج هذا البحث يدلّ أن تطبيق أصول القابلية والشفافية جرى بالجيد، وأشار إلى ذلك وجود خطة العمل وميزانية وحدة العمل الإقليمية (RKA-SKPD) كخطيط للمساعدات المالية لتشغيل المدارس (BOS)، ومطابقة استخدام المال بتعليمات استخدامها، وكذلك إعداد التقرير المالي ومساءلته عند المدرسة والحكومة بكل صراحة. دلت هذه الحقيقة على أن المدرسة قد نفذت عملية إدارة المساعدات المالية لتشغيل المدارس (BOS) وفقا لأنظمة الحكومة أو تعليمات استخدامها في تحسين جودة المدرسة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting, dengan pendidikan orang akan memiliki kompetensi untuk menjawab tantangan-tantangan dan permasalahan global dalam kehidupan. Era globalisasi, pendidikan menjadi suatu yang mahal bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin atau ekonomi rendah. Rendahnya partisipasi pendidikan pada kelompok miskin adalah biaya pendidikan. Pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pendanaan pendidikan.

Bentuk pendanaan pendidikan yang berasal dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan bantuan pemerintah pusat kepada semua sekolah SD/MI dan SMP/MTs. Melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) peserta didik tingkat dasar dan menengah pertama akan dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah. Program BOS ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam mengoperasikan sekolah dan meringankan beban masyarakat luas terhadap pembiayaan pendidikan agar mereka memperoleh layanan.

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu (Sumber: Buku Pedoman BOS 2012).¹

Adanya program dana bantuan operasional sekolah (BOS), sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan dana baik dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi dengan akuntabilitas dan transparansi. Dengan pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat mengetahui dana sekolah yang telah dibelanjakan dan digunakan.

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik terdapat pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48.² Empat prinsip yang telah ditetapkan akan tetapi dalam penelitian ini dua prinsip yang diteliti. Peraturan yang telah ditetapkan pemerintah mengenai pengelolaan dana pendidikan maka seluruh sekolah harus melakukan prinsip yang telah ditetapkan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga mengeluarkan kebijakan baru terkait pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 ini dilampiri petunjuk teknis

¹ Ida Ayu Putu Ari Krisnayanti, *Analisis Persepsi Stakeholder Internal Dan Eksternal Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Banjar Tahun 2013*. Jurnal, Vol: 4 No. 1 Tahun: 2014

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Juknis) BOS. Melalui Permendikbud ini akan mendorong penguatan tata kelola keuangan pendidikan, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja pendidikan, sehingga mendorong perbaikan kualitas belanja pendidikan.³

Beberapa sekolah dasar ataupun menengah tidak transparan dalam pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Masyarakat, orang tua dan juga pemerintah tidak dapat mengetahui pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan disekolah-sekolah yang tidak transparan dalam pengelolaan dana yang diberikan tersebut. Adanya peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sehingga sekolah yang belum akuntabel dan transparan maka wajib melaksanakannya.

Dana penyelenggaraan pendidikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pihak sekolah harus dapat mengelola dana yang telah diberikan oleh pemerintah guna menunjang kegiatan siswa. Dana penyelenggaraan pendidikan ini bersumber dari pemerintah, pengelola dana harus mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat menarik minat pelanggan dalam pendidikan

Peningkatan mutu sekolah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya mengenai pengelolaan keuangan. Penerapan prinsip akuntabel dan transparan akan dapat meningkatkan mutu sekolah. Salah

³ <https://news.okezone.com/read/2017/03/02/65/1632118/kemdikbud-keluarkan-kebijakan-baru-terkait-dana-bos> diakses Rabu, 16 November 2017, 13:26 di Malang

satu hal yang dapat dilihat dari mutu sekolah yang bagus adalah penggunaan prinsip akuntabel dan transparan terhadap seluruh keuangan sekolah, tidak hanya dana Bantuan Operasional Sekolah akan tetapi keuangan sekolah juga.

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang dinilai oleh orang lain, karena kualitas performa atau kinerja dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi bidang garap, dan tanggungjawabnya.⁴ Sedangkan, akuntabilitas finansial yaitu pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efektif dan efisien.⁵ Pengelolaan keuangan secara akuntabel dapat menjadikan sekolah tersebut mendapatkan nilai positif dari masyarakat dan pemerintah.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan penyelenggaraan, serta hasil-hasil yang dicapai.⁶ Pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan secara transparan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu sekolah, karena dengan mutu yang baik maka sekolah tersebut akan mendapatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan seluruh program pendidikan di sekolah. Transparansi dapat menciptakan timbal balik antara pemerintah, masyarakat orang tua dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan

⁴ Agus Wibowo, *Akuntabilitas Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 44

⁵ Ibid hlm. 56

⁶ Denny Boy dan Hotniar Siringoringo, *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid*. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 12 Vol. 14, Agustus 2009

menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadahi.

Berdasarkan salah satu penelitian sebelumnya tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, banyak sekolah yang belum melakukan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Pengelolaan yang dianggap tidak transparan akan berdampak negatif bagi perkembangan sekolah, karena orang tua akan meragukan sumbangan yang mereka berikan dan bantuan operasional sekolah yang ada akan benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan penyelenggaraan pendidikan atau akan terjadi penyimpangan yang tidak diharapkan.

Dari data di atas akan dapat diketahui bahwa sekolah yang melakukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan maka sekolah itu dapat dianggap sebagai sekolah yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Sebaliknya jika sekolah tersebut tidak melakukan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan maka sekolah tersebut kurang dipercaya bahkan tidak dipercaya oleh masyarakat.

SMP Negeri 3 Malang ini merupakan salah satu sekolah favorit, yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dapat menjadi pandangan sekolah lain yang belum menerapkan dua prinsip dalam pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah. Berdasarkan uraian di atas maka **Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah di**

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Malang sangat penting untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menguraikan rumusan masalah dibawah ini:

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Malang?
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Malang
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Malang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk referensi penelitian selanjutnya yang relevan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya

dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah baik ditingkat daerah maupun di tingkat pusat untuk mengevaluasi kebijakannya, apakah perlu dilanjutkan atau diberhentikan.

b. Manfaat bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan kepustakaan tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan;

Untuk memperluas wawasan peneliti tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

c. Manfaat bagi SMP Negeri 3 Malang

1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Malang.

2) Diharapkan dengan adanya penelitian tentang analisis akuntabilitas dan transparansi keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka hasil dari hasil dari penelitian ini dapat memberikan solusi yang baik kepada sekolah yang belum menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam keuangan.

E. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS diantaranya adalah Ristya Dwi Anggraini (2013)⁷ melakukan penelitian tentang *Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BoS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya*; ditemukan bahwa transparansi pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah dalam program RKAS di SDN Pancarkeling VIII sangat transparan. Hal tersebut dapat dilihat dari terbentuknya informasi mengenai penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam program RKAS. Dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah dalam program RKAS dapat dilihat dengan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah berupa lampiran formulir yang ditandatangani kepala sekolah, bendahara sekolah dan ketua komite sekolah dan mengirimkan kepada UPTD dan Tim Bantuan Operasional Sekolah Pusat.

Denny Boy dan Hotniar Siringoringo (2009)⁸ melakukan penelitian tentang *Analisis pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) terhadap partisipasi Orang tua murid*, ditemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi

⁷ Ristya Dwi Anggraini, *Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya*. Jurnal. Vol: 1 No. 2 Tahun: 2013

⁸ Denny Boy dan Hotniar Siringoringo, *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid*. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 12 Vol. 14, Agustus 2009

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah mempunyai pengaruh positif terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan.

Giyanto (2013)⁹ melakukan penelitian tentang *Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Belah 1 kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan*, ditemukan bahwa (1) Penyusunan dan perencanaan dana BOS dikelola dengan baik. (2) Pelaksanaan pengelolaan dana sudah transparan sesuai dengan tujuan, pembukuan sesuai ketentuan, namun perlu dibentuk tim kerja barang, pemajangan penggunaan dana BOS selalu dilakukan sebagai bentuk keterbukaan dan sosialisasi kepada komite atau masyarakat. (3) Monitoring tidak dilakukan oleh tim Manajemen BOS Kabupaten namun hanya dilakukan oleh Pengawas TK dan SD Kecamatan, monitoring atau pengawasan juga dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten sekali setahun. (4) Evaluasi dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten dilakukan setahun sekali bersamaan dengan bimtek BOS, penyusunan RKAS tahun berikutnya. (5) pelaporan dilakukan secara intern dan ekstern mulai dari laporan triwulan, semester dan tahunan masuk dalam kategori transparan sesuai ketentuan. (6) Partisipasi masyarakat, melalui komite sekolah terhadap perencanaan, penyaluran, dan penggunaan data sampai pelaporan sangat baik dan transparan.

⁹ Giyanto, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Belah 1 kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan*. Naskah Publikasi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013

Fierda Shafratunnisa (2015)¹⁰ melakukan penelitian tentang *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir* ditemukan bahwa bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan SD Islam Binakheir kepada stakeholders sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan mulai yayasan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan, dan komite dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan standar operasional prosedur SD Islam Binakheir. Penelitian-peneitian sebelumnya yang telah membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana BOS disebutkan dalam tabel berikut ini :

¹⁰ Fierda Shafratunnisa. *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir*, Skripsi. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015

Tabel 1.1
Tabel Originalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul, Bentuk (skripsi/tesis/jurnal/dll) Penerbit, dan Tahun Penelitain	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Ristya Dwi Anggraini, <i>Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BoS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya</i> , Jurnal, 2013	a. Akuntabilitas b. Transparansi c. Dana BOS	Penelitian sebelumnya meneliti Program RKAS	Peneliti akan meneliti tentang penerapan akuntabilitas dan transparansi dana BOS dengan menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian sebelumnya memiliki variabel yaitu program RKAS dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.
2.	Denny Boy dan Hotniar Siringoringo, <i>Analisis pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) terhadap partisipasi Orang tua murid</i> , Jurnal, 2009	a. Akuntabilitas b. Transparansi	Penelitian sebelumnya meneliti tentang partisipasi orang tua murid	Peneliti akan meneliti tentang penerapan akuntabilitas dan transparansi dana BOS sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang partisipasi orang tua ketika sudah melakukan akuntabilitas dan transparansi Dana BOS
3.	Giyanto, <i>Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Belah 1 kecamatan Donorojo</i>	a. Akuntabilitas b. Dana BOS	Transparansi	Peneliti akan meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi dana BOS sedangkan penelitian sebelumnya hanya

	<i>Kabupaten Pacitan, 2013</i>			meneliti akuntabilitas,
4.	Fierda Shafratunnisa, <i>Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir, 2015</i>	a. Akuntabilitas b. Transparansi	a. Pengelolaan keuangan sekolah b. Pengelolaan dana BOS	Penelitian sebelumnya lebih dalam keuangan secara keseluruhan sedangkan peneliti lebih konsentrasi terhadap dana BOS.
5.	Ony widilestariningtyas dan Irvan Permana, <i>Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 2015</i>	a. Transparansi b. Akuntabilitas	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Peneliti sebelumnya pada kualitas laporan keuangan pemerintah sedangkan peneliti dalam pengelolaan dana BOS

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu memiliki variabel y akan tetapi penelitian ini tidak menggunakan variabel y . Sedangkan persamannya adalah penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya tabel di atas dapat mempermudah pembaca dalam memahaminya. Berdasarkan hal tersebut maka pembaca dapat menarik kesimpulan dari persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilaksanakan dan penelitian yang telah dilaksanakan.

H. Definisi Istilah

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu kegiatan dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran, asal usul atau sebab akibat. Analisis dalam penelitian ini bermaksud untuk memperoleh informasi melalui pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Analisis dilakukan untuk mengetahui keadaan sebenarnya objek yang akan diteliti.
2. Prinsip merupakan asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dalam melakukan sebuah kegiatan. Prinsip juga dapat diartikan sebagai acuan dalam melakukan suatu kegiatan atau tugas yang telah diberikan.
3. Akuntabilitas adalah melakukan pertanggung jawaban atas apa yang sudah dilakukan yang sesuai dengan keadaan. Pengelolaan dan pelaksanaan dari suatu kegiatan atau kebijakan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau lembaga tertentu. Pertanggung jawaban dilakukan agar lembaga atau seseorang mengetahui tolak ukur atau pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Hasil dari pertanggung jawaban tersebut akan menjadi bahan evaluasi suatu lembaga dalam melakukan kegiatan. Jadi, akuntabilitas keuangan adalah kegiatan pertanggung jawaban lembaga atas keuangan sekolah baik dana subsidi dari pemerintah ataupun dana sumbangan. Pertanggung jawaban yang dilakukan akan dapat meningkatkan mutu sekolah tersebut menjadi lebih baik. Sehingga akuntabilitas atau pertanggung jawaban itu perlu dilakukan.

4. Transparansi merupakan keterbukaan dalam menyampaikan informasi. Informasi yang diperoleh akan disampaikan kepada khalayak sesuai dengan kenyataan. Dengan menyampaikan informasi secara terbuka maka masyarakat akan percaya dengan orang atau lembaga tersebut. Jadi, transparansi keuangan dalam dunia pendidikan adalah keterbukaan dalam hal keuangan sekolah, dengan memberikan informasi akan keluar masuk keuangan sekolah maka para stakeholder akan mempercayai sekolah itu. Sekolah yang melakukan transparansi dalam keuangan dapat meningkatkan mutu dari sekolah tersebut.
5. Pengelolaan merupakan suatu proses melakukan kegiatan tertentu dengan tenaga orang lain guna untuk mencapai tujuan. Tenaga orang lain yang dimaksud adalah orang yang melaksanakan kebijakan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dana bos dikelola untuk pelaksanaan kegiatan sekolah dan siswa.
6. Dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan dan kesejahteraan kepada orang yang berhak menerimanya. Pemberian dana oleh pemerintah kepada sekolah merupakan dana bos. Dana bos diberikan untuk dapat mencukupi kebutuhan siswa dan kegiatan sekolah.
7. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program penyediaan pendanaan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai

pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Dana yang diberikan pemerintah akan dialokasikan sebagai dana penunjang dalam kegiatan sekolah selebihnya dana tersebut akan diberikan kepada siswa yang kurang mampu.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini disusun untuk mempermudah pemahaman akan isi dari skripsi ini, diantaranya adalah:

Bagian pertama adalah pendahuluan, didalamnya akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, dalam latar belakang dijelaskan tentang pemilihan masalah yang diangkat. Selanjutnya rumusan masalah harus disusun secara singkat, padat dan jelas, mengarah pada variabel yang akan diteliti dan harus dalam bentuk kalimat tanya. Setelah rumusan masalah adalah tujuan yang berisi mengenai sasaran yang akan dicapai dalam penelitian dan mengacu pada rumusan masalah. Selanjutnya adalah manfaat penelitian memuat manfaat yang akan diperoleh pembaca dan juga pihak-pihak yang terlibat baik teoritis maupun praktis. Dalam bagian pertama juga terdapat originalitas penelitian, ditulis agar tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah definisi istilah, merupakan istilah yang yang dimaksud adalah variabel-variabel dalam masalah yang akan diteliti. Selanjutnya sistematika pembahasan, berisi tentang ide-ide pokok yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi.

Bagian ke-dua merupakan kajian pustaka, didalam bab ini ditulis berdasarkan dengan variabel yang akan diteliti sehingga harus dijelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan dana Bantuan Operasional Sekolah. Selanjutnya adalah kerangka berfikir, kerangka berfikir disusun dengan bagan-bagan yang akan dapat menggambarkan penelitian kita.

Bagian ke-tiga metode penelitian yang menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, dalam pendekatan penelitian digunakan peneliti untuk dapat membantu menjawab rumusan masalah yang telah disusun, sedangkan jenis penelitian untuk dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis. Dalam bagian ketiga ini juga ada penjelasan mengenai pentingnya kehadiran peneliti dalam penelitian, dengan hadirnya peneliti akan dapat membantu mengumpulkan data yang diperlukan. Selanjutnya lokasi penelitian, ditulis berdasarkan alasan memilih lokasi penelitian tersebut berdasarkan dengan keunikannya misalnya.

Kemudian, dalam bab tiga juga terdapat data dan sumber data, dalam bagian ini dijelaskan jenis data apa saja yang harus dikumpulkan agar membantu menjawab masalah yang telah dibuat. Sedangkan sumber data menjelaskan data yang sudah kita kumpulkan itu bersumber dari informan atau lain sebagainya. Teknik pengumpulan data, menjelaskan cara yang dipakai peneliti dalam mengumpulkan data misalnya wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data, selanjutnya data tersebut

dianalisis dengan cara melakukan analisis terhadap data yang kita dapatkan berdasarkan hasil wawancara dan sebagainya. Selanjutnya prosedur penelitian ini dituliskan tahap-tahap yang dilakukan peneliti dari awal melakukan penelitian hingga publikasi.

Bagian ke-empat, berisi tentang paparan data dan temuan penelitian. Paparan data berisi tentang deskripsi data yang digunakan untuk dapat menjawab rumusan masalah. Sedangkan temuan penelitian ditulis berdasarkan temuan yang kita dapatkan dalam penelitian tersebut.

Bagian ke-lima, dalam bab ini akan disajikan tentang pembahasan hasil penelitian. Hasil dari penelitian dijelaskan jawaban dari rumusan masalah yang sudah disusun dan menjelaskan tujuan dari masalah yang dicapai, menjelaskan temuan-temuan penelitian yang dilakukan dan lain sebagainya.

Bagian ke-enam, penutup merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang didalamnya berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditulis atas dasar hasil dari penelitian yang kita lakukan untuk menjawab rumusan masalah, serta saran-saran yang diajukan untuk dapat melakukan penelitian lebih baik lagi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntabilitas

a. Definisi Akuntabilitas

Menurut Peter Salim, akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban.¹¹ Sri Minarti menjelaskan bahwa, Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.¹²

Mardiasmo menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.¹³

Ada tiga pilar yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu: (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja, disetiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas,

¹¹<http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/definisi-pengertian-akuntabilitas-konsep.html>
diakses Rabu, 16 November 2017, 17.00 di Malang

¹²Sri Minarti, *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm 225.

¹³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), hlm 20.

fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.¹⁴

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan atau pengelolaan keuangan suatu lembaga atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan *stakeholder* dari suatu lembaga tersebut. Berdasarkan beberapa definisi akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan pemerintahan yang baik.

Menurut Sulistoni pemerintahan yang *accountable* memiliki ciri ciri sebagai berikut: (1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, (2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, (3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, (4) Mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan (5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggung jawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.¹⁵

¹⁴ Jamal Ma'ruf Asmani, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah* (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), hlm. 220-221.

¹⁵ Ony Widilestariningtiyas dan Irvan Permana, *Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Universitas Komputer Indonesia diakses pada Rabu, 01 November 2017 12.51

b. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat.

Slamet menyatakan tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.¹⁶

Rumusan tujuan akuntabilitas di atas hendak menegaskan bahwa akuntabilitas bukanlah akhir dari sistem penyelenggaraan manajemen sekolah, tetapi merupakan faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi lagi. Bahkan, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas baru sebagai titik awal menuju keberlangsungan manajemen sekolah yang berkinerja tinggi.

¹⁶ Slamet Suyanto, *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini* (Yogyakarta : Hikayat Publishing, 2005), hlm. 5.

c. Pelaksana Akuntabilitas Pendidikan

Made Pidarta menyebutkan bahwa pelaksana akuntabilitas ditekankan pada guru, administrator, orang tua siswa, masyarakat serta orang-orang luar lainnya. Di dalam perencanaan *participatory*, yaitu perencanaan yang menekankan sifat lokal atau desentralisasi, akuntabilitas ditujukan pada sejumlah personil sebagai berikut:

- a) Manajer/ administrator/ ketua lembaga, sesuai dengan fungsinya sebagai manajer.
- b) Ketua perencana, yang dianggap paling bertanggungjawab atas keberhasilan perencanaan. Ketua perencana adalah dekan, rektor, kepala sekolah, atau pimpinan unit kerja lainnya.
- c) Para anggota perencana, mereka dituntut memiliki akuntabilitas karena mereka bekerja mewujudkan konsep perencanaan dan mengendalikan implementasinya di lapangan.
- d) Konsultan, para ahli perencana yang menjadi konsultan.
- e) Para pemberi data, harus memiliki performan yang kuat mengingat tugasnya memberikan dan menginformasikan data yang selalu siap dan akurat.¹⁷

d. Langkah-langkah Akuntabilitas Pendidikan

Made Pidarta merumuskan langkah-langkah yang harus di tempuh untuk menentukan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan, sebagai berikut:

- a) Menentukan tujuan program yang dikerjakan, dalam perencanaan disebut misi atau tujuan perencanaan.
- b) Program dioperasionalkan sehingga menimbulkan tujuan-tujuan yang spesifik.
- c) Menggambarkan kondisi tempat bekerja.
- d) Menentukan otoritas atau kewenangan petugas pendidikan.
- e) Menentukan pelaksana yang akan mengerjakan program/ tugas. Ia penanggungjawab program, menurut konsep akuntabilitas ia adalah orang yang dikontrak.

¹⁷ Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem* (Jakarta:Asri Mahasatya, 2005), hlm.10.

- f) Membuat kriteria performan pelaksana yang dikontrak secara jelas, sebab hakekatnya yang dikontrak adalah performan ini.
- g) Menentukan pengukur yang bersifat bebas, yaitu orang-orang yang tidak terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
- h) Pengukuran dilakukan sesuai dengan syarat pengukuran umum yang berlaku, yaitu secara insidental, berkala dan hasil pengukuran dilaporkan kepada orang yang berkaitan.¹⁸

e. Upaya-Upaya Peningkatan Akuntabilitas

Menurut Slamet ada delapan hal yang harus dikerjakan oleh sekolah untuk peningkatan akuntabilitas:

- a) Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.
- b) Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
- c) Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/ stakeholders di awal setiap tahun anggaran.
- d) Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholders.
- e) Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/ stakeholders diakhir tahun.
- f) Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.
- g) Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.
- h) Memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.¹⁹

Kedelapan upaya di atas, semuanya bertumpu pada kemampuan dan kemauan sekolah untuk mewujudkannya. Jika sekolah mengetahui sumber dayanya, maka dapat lebih mudah digerakkan untuk mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas. Sekolah dapat melibatkan *stakeholders* untuk menyusun dan memperbaharui sistem

¹⁸ Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem* (Jakarta:Asri Mahasatya, 2005), hlm. 11.

¹⁹ Slamet Suyanto, *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini* (Yogyakarta : Hikayat Publishing, 2005), hlm. 6.

yang dianggap tidak dapat menjamin terwujudnya akuntabilitas di sekolah. Komite sekolah, orang tua siswa, kelompok profesi, dan pemerintah dapat dilibatkan untuk melaksanakannya. Dengan begitu *stakeholders* sejak awal tahu dan merasa memiliki akan sistem yang ada.

Untuk mengukur berhasil tidaknya akuntabilitas dalam manajemen berbasis sekolah, dapat dilihat pada beberapa hal, sebagaimana dinyatakan oleh Slamet beberapa indikator keberhasilan akuntabilitas adalah:

- (1) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah.
- (2) Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan
- (3) Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.²⁰

Ketiga indikator di atas dapat dipakai oleh sekolah untuk mengukur apakah akuntabilitas manajemen sekolah telah mencapai hasil sebagaimana yang dikehendaki. Tidak hanya publik merasa puas, tetapi sekolah akan mengalami peningkatan dalam banyak hal.

2. Transparansi

a. Definisi Transparansi

Dengan diterapkannya manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan, pihak sekolah harus menerapkan prinsip-

²⁰ Slamet Suyanto, *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), hlm. 7.

prinsip keuangan. Menurut Mardiasmo prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan adalah transparansi, akuntabilitas dan *value for money*. Sama halnya dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah sekolah juga harus menjalankan pengelolaan keuangannya dengan memakai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.²¹

Transparansi berasal dari adanya informasi tanpa adanya informasi transparansi tidak akan terlaksana. Dengan adanya transparansi maka *stakeholder* sekolah akan mengetahui pengelolaan keuangan yang ada di sekolah sehingga tidak akan ada manipulasi data.

Menurut Mardiasmo transparansi berarti keterbukaan (*open proses*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.²²

Sedangkan pengertian transparansi menurut Meutiah Ganie Rahman mengatakan bahwa transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi

²¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: Penerbit ANDI,2002), hlm. 105.

²² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit Andi,2002), hlm. 30.

diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.²³

Menurut pendapat dari Sulistoni, transparansi merupakan prasyarat untuk terjadinya partisipasi masyarakat yang semakin sehat karena:

- a) Tanpa informasi yang memadai tentang penganggaran, masyarakat tidak punya kesempatan untuk mengetahui, menganalisis, dan mempengaruhi kebijakan,
- b) Transparansi memberi kesempatan aktor diluar eksekutif untuk mempengaruhi kebijakan dan alokasi anggaran dengan memberi perspektif berbeda dan kreatif dalam debat anggaran,
- c) Melalui informasi, legislatif dan masyarakat dapat melakukan monitoring terhadap keputusan dan kinerja pemerintah. Tanpa kebebasan informasi fungsi pengawasan tidak akan efektif,
- d) Berdasarkan teori yang ada menunjukkan bahwa semakin transparan sebuah kebijakan publik maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.²⁴

b. Manfaat Transparansi

Menurut Sri Minarti manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua, siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.²⁵

Sedangkan Nico berpendapat bahwa, beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut:

²³ Ony Widilestariningtiyas dan Irvan Permana, Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jurnal Universitas Komputer Indonesia diakses pada Rabu, 01 November 2017 12.51

²⁴ Ibid

²⁵ Sri Minarti, *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 224.

- a) Mencegah korupsi.
 - b) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
 - c) Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
 - d) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
 - e) Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
 - f) Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.²⁶
- c. Indikator Keberhasilan Transparansi

Menurut IDASSA yang dikutip oleh Nico bahwa keberhasilan transparansi suatu lembaga ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut:

- a) Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi
 - (1) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi
 - (2) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.
 - (3) Adanya basis legal untuk pajak
 - (4) Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah pajak
 - (5) Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintah.
- b) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
 - (1) Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses anggaran)
 - (2) Diumumkannya setiap kebijakan anggaran
 - (3) Dipublikasikannya setiap hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang)
 - (4) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal
 - (5) Terbukanya informasi tentang pembelajaran aktual
- c) Adanya audit yang independen dan efektif
 - (1) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif
 - (2) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas
 - (3) Adanya sistem peringatan dini dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.

²⁶ Nico Adrianto, *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 21.

- d) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
- (1) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
 - (2) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.²⁷

3. Bantuan Operasional Sekolah

a. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa bantuan mempunyai arti barang yang dipakai untuk membantu, pertolongan, sokongan, mendapatkan kredit dari bank. Pengertian operasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah operasional mempunyai arti (bersifat) operasi, berhubungan dengan operasi atau pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan didasarkan pada aturan yang berlaku. Adapun pengertian sekolah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan waktu atau pertemuan ketika murid diberi pelajaran. Permendikbud RI mengemukakan bahwa Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.²⁸

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai

²⁷ Nico Adrianto, *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 21-22.

²⁸ Kartika Eva Prestiana, *Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam kegiatan dan anggaran Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Gugus Sari Kelapa Kecamatan Cilongok*. Skripsi (dipublikasikan) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm 19

pelaksanaan program wajib belajar. Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintahan daerah, dan masyarakat.²⁹

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan yang diberikan pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka pihak sekolah dan orang tua terbantu untuk menjalankan pendidikan yang layak bagi anak.³⁰

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non personal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personal dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.

²⁹ Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. (Yogyakarta: Az-Ruzz Media, 2010) hlm, 189

³⁰ Kompri, *Manajemen Sekolah Teori & Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 238.

b. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum tujuan BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka program wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- a) Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS
- b) Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- c) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat
- d) Membebaskan pungutan peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.³¹

c. Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah

Ketentuan sekolah yang berhak menurut BOS yaitu:

- a) Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua, atau wali peserta didik.
- b) Semua sekolah swasta yang sudah mempunyai izin operasional yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS.
- c) Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
- d) Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- e) Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI di perbolehkan memungut dana dari orangtua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemerintah harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.

³¹ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Yogyakarta: Az-Ruzz Media, 2010), hlm.192.

- f) Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI dan SBI tetap di perbolehkan memungut dana dari orangtua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah serta menggratiskan siswa miskin³²

d. Komponen Pembiayaan BOS pada SMP

Berdasarkan Pedoman Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS yang diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut:

- a) Pengembangan perpustakaan
- b) Penerimaan Peserta Didik Baru
- c) Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
- d) Kegiatan evaluasi pembelajaran
- e) Pengelolaan sekolah
- f) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah
- g) Langganan daya dan jasa
- h) Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana
- i) Pembayaran honor
- j) Pembelian atau perawatan alat multi media pembelajaran
- k) Biaya lainnya³³

e. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah

Pengalokasian dan BOS dilakukan sebagai berikut:

- a) Tim manajemen BOS pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi.
- b) Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim Manajemen BOS Pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA provinsi.
- c) Tim Manajemen BOS Provinsi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten / Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah.
- d) Tim Manajemen BOS Kabupaten / Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK). SK penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh

³² Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Yogyakarta: Az-Ruzz Media, 2010), hlm197.

³³ Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. hlm 57-69

Kepala Dinas Pendidikan Kab / Kota dan Dewan Pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima (Format BOS-02A dan Format BOS 02B). Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).

- e) Tim Manajemen BOS Kab / Kota mengirimkan SK alokasi BOS dengan melampirkan daftar nama sekolah ke Tim Manajemen BOS Provinsi, tembusan ke BANK / Pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS.³⁴
- f. Larangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Larangan penggunaan dana bos yaitu;³⁵

- a) Disimpan dengan maksud dibungakan.
- b) Dipinjamkan kepada pihak lain.
- c) Membeli *software*/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau perangkat sejenis
- d) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, antara lain studi banding, *study tour* (karya wisata), dan sejenisnya.
- e) Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya.
- f) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
- g) Membiayai akomodasi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya.
- h) Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah)
- i) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
- j) Membangun gedung / ruang baru, kecuali pada SMP yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan atau kantin sehat;
- k) Membeli lembar kerja siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- l) Menanamkan saham.
- m) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau sumber lainnya;
- n) Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan membiayai penyelenggaraan upacara atau acara keagamaan; dan atau
- o) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan / sosialisasi / pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan atau kementerian pendidikan dan kebudayaan.

³⁴ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. (Yogyakarta: Az-Ruzz Media, 2010) hal. 217.

³⁵ Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah hal 43-44

g. Sanksi

Sanksi yang diterima adalah,³⁶

- a) Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, dan mutasi kerja)
- b) Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOS yang terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan atau ke kas negara.

Penerapan proses hukum, yaitu melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS.

B. Integrasi dalam Islam

Akuntabilitas dalam Islam adalah amanah, maksudnya melakukan apa yang menjadi tugasnya dan dapat mempertanggung jawabkan apa yang sudah dilakukan sehingga semua kegiatan dapat dipertanggung jawabkan dengan jelas. Berikut ini ayat (Al Baqarah 282) yang menjelaskan tentang akuntabilitas:³⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
 مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
 تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
 تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ

³⁶ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Yogyakarta: Az-Ruzz Media, 2010), hal. 220.

³⁷ Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: Darus Sunnah, 2010) hlm, 49

لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٨٢﴾

Artinya:

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al Baqarah:282)

Transparasi dalam Islam adalah *sidiq*, maksud dari *sidiq* adalah jujur, menyampaikan apa yang dilakukan sebenarnya sehingga dengan

kebenaran tersebut dapat dipercaya oleh orang lain. Berikut ini surat Ibrahim ayat 4 yang menjelaskan tentang transparansi:³⁸

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya:

Kami tidak mengutus seorang Rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. (14: 4)

Dalam Tafsir jalalain Surat Al-Qashash ayat 26

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata yakni wanita yang disuruh menjemput Nabi Musa yaitu yang paling besar atau yang paling kecil ("Ya bapakku! Ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita sebagai pekerja kita, khusus untuk menggembalakan kambing milik kita, sebagai ganti kami karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya") maksudnya, jadikanlah ia pekerja padanya, karena dia adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Lalu Nabi Syuaib bertanya kepada anaknya tentang Nabi Musa. Wanita itu menceritakan kepada ayahnya semua apa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa, mulai dari mengangkat bata penutup sumur, juga tentang perkataannya, "Berjalanlah di belakangku". Setelah Nabi Syuaib mengetahui melalui cerita putrinya bahwa ketika putrinya datang menjemput Nabi Musa, Nabi Musa menundukkan pandangan

³⁸ Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: Darus Sunnah, 2010) hlm, 256

matanya, hal ini merupakan pertanda bahwa Nabi Musa jatuh cinta kepada putrinya, maka Nabi Syuaib bermaksud mengawinkan keduanya

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Janganlah kamu memperhatikan banyaknya shalat dan puasanya, jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesalehannya. Tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanat.”³⁹

C. Kerangka Berfikir

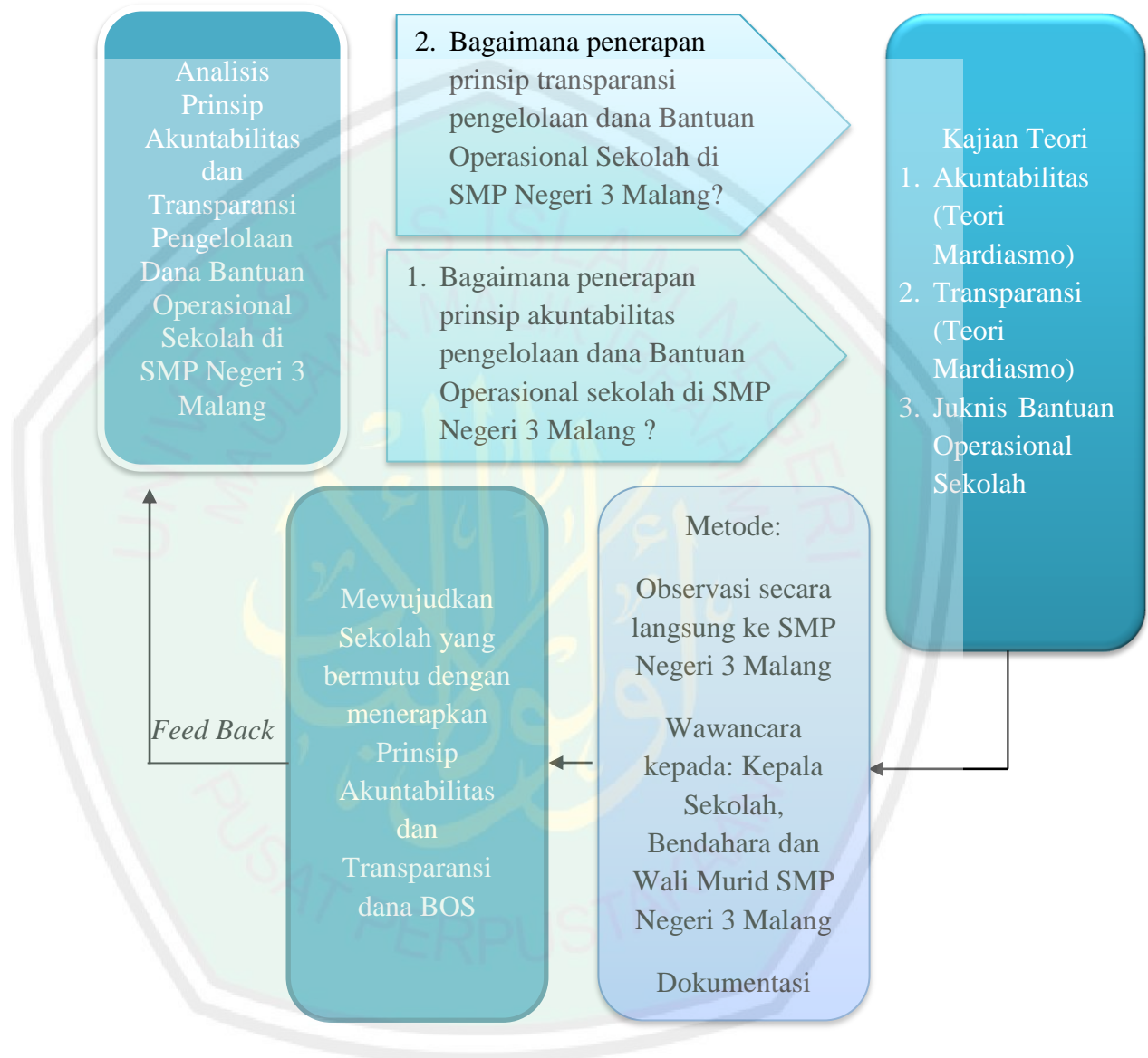
Sekolah yang maju dapat ditentukan oleh beberapa aspek mulai dari mutu pendidikan dan lulusan yang unggul, sarana prasarana yang lengkap dan memadai, tenaga pendidik dan kependidikan yang handal dan profesional, dan tentunya manajemen/pengelolaan keuangan yang baik. Masalah yang sering dirasakan oleh *stakeholder* adalah tentang pengelolaan keuangan.

Masalah tersebut timbul dikarenakan kurang adanya keterbukaan dan tanggungjawab pihak sekolah dalam pengelolaan keuangan terhadap *stakeholder*. Kurangnya keterlibatan *stakeholder* dalam perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran keuangan sekolah juga menjadi penyebab masalah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak sekolah belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan baik, maka akan dapat meningkatkan mutu

³⁹ <https://tafsirq.com/28-al-qasas/ayat-26> diakses Rabu, 16 November 2017, 13:26 di Malang

sekolah. Berikut ini terdapat kerangka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.



Gambar. 2.1
Bagan kerangka berfikir

Bagan kerangka berfikir dalam penelitian ini menggambarkan garis besar penelitian yang akan dilakukan. Dengan kerangka berfikir ini pembaca akan memahami apa yang akan dilakukan peneliti dalam

melakukan penelitian tersebut. Sehingga pembaca juga akan memahami garis besar penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Dari gambar bagan kerangka berfikir di atas kita dapat melihat bahwa judul dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diteliti. Dalam masalah yang akan diteliti akan dikaitkan dengan teori yang sudah ada. Hasil dari penggabungan antara masalah dengan teori dengan menggunakan metode penelitian maka akan menghasilkan suatu temuan dalam penelitian. Temuan tersebut akan menjadi suatu hasil dari penelitian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara utuh mengenai analisis prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 3 Malang dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini peneliti berkeinginan mengungkapkan fenomena yang terjadi di lembaga pendidikan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dana BOS

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bersifat menghasilkan teori di lapangan dan mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah merupakan prinsip yang dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan mutu sekolah. Rujukan peneliti mengenai penelitian ini adalah ketika sekolah melakukan prinsip akuntabilitas dan transparansi maka sekolah itu bersifat positif dan dapat meningkatkan kecerjayaan dan partisipasi masyarakat dan begitupun sebaliknya.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif, peneliti memilih jenis penelitian deskriptif analisis. Penelitian kualitatif deskriptif analisis akan dapat memaparkan kejadian dalam sebuah situasi dilapangan. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS dalam peningkatan mutu sekolah di SMP Negeri 3 Malang.

Penelitian ini berupaya mengkaji fenomena atau peristiwa suatu proses yang terkait dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi dana BOS. Pendekatan dan jenis penelitian tersebut akan dapat mengetahui dan dapat menganalisis pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS.

3. Kehadiran Peneliti

Pentingnya kehadiran peneliti dalam suatu penelitian adalah sebagai instrumen dalam penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Kehadiran peneliti akan mendapatkan tujuan dalam penelitian tersebut. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti akan maksimal karena peneliti hadir dalam lokasi penelitian. Informasi dari narasumber akan terbukti kevalidannya karena peneliti hadir dalam penelitian tersebut.

Peneliti hadir dalam lokasi penelitian akan mendapatkan informasi yang akurat karena peneliti mengumpulkan data dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian tersebut dengan mengamati secara langsung dan mempertanyakan hal yang kurang difahami secara langsung kepada informan yang ada dalam penelitian tersebut. Sehingga kehadiran peneliti dalam suatu penelitian itu sangat penting.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Malang yang berada di Jl. Dr. Cipto No.20,3, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia.

Sekolah ini berada ditengah Kota Malang, akses untuk menuju sekolah ini tergolong mudah karena dengan kemajuan teknologi sekarang dengan adanya transportasi yang sangat mudah digunakan.

Alasan peneliti memilih sekolah ini menjadi objek dalam penelitian karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang melakukan akuntabilitas dan transparansi keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah. Di sisi lain sekolah ini juga termasuk sekolah yang maju, sekolah yang memiliki mutu yang baik sehingga menjadi sekolah favorit di kota Malang.

5. Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Data perencanaan anggaran, penggunaan dana yang telah diberikan, pegalokasian dana untuk kegiatan dan laporan pertanggungjawaban dana BOS. Data tenaga pendidik dan kependidikan, dan data siswa SMP Negeri 3 Malang.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan unsur-unsur penting yang terkait dengan masalah penelitian, yakni Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan wali murid. Peneliti memilih informan tersebut karena mereka dianggap mengetahui semua tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah. Sehingga data yang didapatkan peneliti dapat dijamin kevalidannya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dengan melakukan berbagai cara diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan melakukan cara tersebut peneliti akan mendapatkan data dan jawaban dari permasalahan yang diajukan peneliti

a. Observasi

Observasi secara langsung yang dilakukan peneliti akan dapat membantu menjawab rumusan masalah yang akan diteliti. Sehingga peneliti akan mengetahui kevalidan dari data yang didapatkan. Peneliti akan melakukan observasi secara langsung, karena dengan kehadiran peneliti ketika observasi dapat diketahui kebenaran dari hasil penelitian.

Tabel 3.1
Kisi-kisi observasi

No.	Variabel	Observasi
1.	Penerapan prinsip akuntabilitas	a. Melihat laporan pertanggung jawaban. b. Mengamati laporan keuangan
2.	Penerapan prinsip transparansi	a. Mengamati cara menerapkan transparansi di sekolah b. Mengamati cara menerapkan transparansi di masyarakat

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data, wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditujukan kepada pihak kepala sekolah, bendahara sekolah dan wali murid SMP Negeri 3 Malang. Pertanyaan yang diajukan peneliti yaitu sesuai dengan

rumusan masalah sehingga, masalah yang akan diteliti dapat terjawab dengan melakukan wawancara. Berikut kisi-kisi pertanyaan yang akan diberikan kepada informan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Kisi kisi wawancara

No.	Variabel	Kisi-kisi	Informan
1.	Penerapan prinsip akuntabilitas	a. Perencanaan anggaran dana BOS	Bendahara SMP Negeri 3 Malang
		b. Penggunaan dana BOS	Bendahara SMP Negeri 3 Malang
		c. Pertanggung jawaban dana BOS	Bendahara SMP Negeri 3 Malang
		d. Pengarsipan laporan	Bendahara SMP Negeri 3 Malang
		e. Alasan dan manfaat sekolah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dana BOS	Kepala sekolah SMP Negeri 3 Malang
2.	Penerapan prinsip transparansi	a. Perencanaan anggaran dana bos	Bendahara SMP Negeri 3 Malang
		b. Pemakaian dana bos	Bendahara SMP Negeri 3 Malang
		c. Publikasi penggunaan dana bos	Bendahara SMP Negeri 3 Malang

c. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, peneliti juga akan menggunakan teknik dokumentasi, dimana dokumen-dokumen yang akan membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah dan dapat menjadi bukti dalam penelitian yang dilakukan. Salah satu dokumen yang dibutuhkan adalah foto dokumentasi mengenai pemaparan laporan keuangan dana

Bantuan Operasional Sekolah. Berikut merupakan kisi-kisi instrumen dokumentasi dalam penelitian ini.

Tabel 3.3
Kisi-kisi Instrumen Dokumentasi

No.	Bagian	Dokumen yang dibutuhkan
1.	Organisasi	Profil SMP Negeri 3 Malang
		Sejarah berdirinya SMP Negeri 3 Malang
		Visi, misi, tujuan, dan sasaran SMP Negeri 3 Malang
2.	Ketenagaan	Data tenaga kependidikan
		Data tenaga pendidik
		Data peserta didik
3.	Keuangan	Laporan keuangan dan LPJ dana BOS
		Rencana Keuangan Anggaran Sekolah (RKAS)
		Data Penggunaan dana BOS

7. Analisis Data

Untuk analisis data, peneliti akan melakukan analisis data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, dokumentasi, serta sumber data yang telah ada untuk dapat disimpulkan. Penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisis data.

- a. Reduksi data dilakukan peneliti dengan mengumpulkan semua data yang diperoleh, serta membuat kategori data yang sesuai jenisnya dan memisahkan data yang tidak digunakan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dari data yang sudah terkumpul akan dilakukan pemilihan data yang

dirasa penting kurang penting dan tidak penting sehingga data yang tidak penting akan dipisahkan dari data-data yang penting.

- b. Penyajian dilakukan dengan memisahkan data sesuai dengan jenis dan macamnya sehingga mudah dipahami. Data disajikan sesuai dengan rumusan masalah sehingga dapat dengan mudah ditarik kesimpulan dari data tersebut.
- c. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis dan mendeskripsikan data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga mendapatkan kesimpulan dengan menjawab rumusan masalah.

8. Prosedur Penelitian

a. Kajian pustaka

Penelitian ini dimulai dengan membaca dan mencari literatur atau berita terkait dengan masalah apa yang akan diteliti. Kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Peneliti harus mencari terlebih dahulu literatur yang menjelaskan tentang prinsip tersebut. Selanjutnya mencari berita tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Berkaitan dengan hal itu maka peneliti harus mencari dan melihat laman BOS di web dan melihat web Dinas Pendidikan guna mengetahui sekolah yang mendapatkan dana BOS

b. Kajian penelitian terdahulu

Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah mencari penelitian terdahulu yang relevan dan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan kita lakukan. Dengan adanya penelitian terdahulu akan dapat menjadikan evaluasi bagi penelitian selanjutnya.

c. Kajian penelitian pra lapangan

Penelitian pra lapangan ini dilakukan peneliti dengan melakukan survei lapangan yang akan menjadi lokasi penelitian. Sehingga peneliti mengetahui lokasi yang akan diteliti. Selain itu penelitian pra lapangan juga berguna untuk mengetahui sekolah tersebut mendapatkan benar mendapatkan dana BOS dan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

d. Penyusunan proposal

Proposal disusun untuk mengetahui latar belakang masalah yang akan diteliti dan mengetahui metode apa yang akan digunakan dalam penelitian ini. Selain itu proposal juga berisi mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

e. Penyusunan instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpul data disusun untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data baik dalam hal wawancara, observasi dan juga dokumentasi.

f. Pelaksanaan penelitian dilapangan

Pelaksanaan penelitian lapangan yang dilakukan peneliti dengan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian. Penelitian

lapangan dilakukan hingga data yang dibutuhkan dirasa cukup untuk menjawab masalah.

g. Penyusunan draf awal skripsi

Setelah melakukan penelitian lapangan langkah selanjutnya adalah dengan menyusun draf penelitian skripsi. Dengan memperhatikan pedoman penulisan penelitian skripsi yang sudah ditentukan sebelumnya.

h. Penyusunan skripsi secara lengkap

Penyusunan skripsi secara lengkap berdasarkan penelitian lapangan dan data yang sudah terkumpul dilakukan setelah menyusun draf awal skripsi. Draft awal skripsi tersebut akan memudahkan untuk menulis skripsi secara lengkap.

i. Bimbingan dan sidang skripsi

Setelah menyusun skripsi secara lengkap selanjutnya melakukan bimbingan terhadap dosen yang membimbing selama penelitian. Setelah mendapatkan bimbingan dan mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing maka tahap selanjutnya adalah dengan mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian sidang skripsi atas penelitian yang sudah dilakukan

j. Perbaikan

Berdasarkan sidang skripsi maka tahap selanjutnya ialah perbaikan skripsi yang sudah di uji. Perbaikan yang dimaksud ialah perbaikan skripsi yang telah diujikan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Sejarah SMP Negeri 1 Malang

SMP Negeri (SMPN) 3 Malang, merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Cikal bakal SMP Negeri 3 Malang adalah Sekolah Mulo Wilhelmina. Sekolah ini berdiri pada tanggal 17 Maret 1950. Pada tahun 1960, nama Sekolah Mulo Wilhelmina diubah oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi SMP Negeri 3 Malang dengan semboyan Bina Taruna Adiloka (Bintaraloka).

2. Visi dan Misi SMP Negeri 3 Malang

Visi:

Unggul dalam IPTEKS, Terampil dan Mandiri berlandaskan IMTAQ, Berbudhi Pekerti Luhur, dan Berbudaya lingkungan.

Misi :

- a. Melaksanakan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menjalin kerjasama dengan seluruh stake holder.
- c. Melaksanakan pola pengelolaan sekolah sesuai dengan MBS dan standar menejemen berbasis ISO.
- d. Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM.

- e. Melaksanakan kerjasama dengan sekolah lain Nasional maupun Internasional
- f. Melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien

3. Tujuan SMP Negeri 3 Malang

- a. Menyelaraskan fasilitas yang telah dimiliki sekolah sesuai dengan kemajuan dan globalitas perkembangan dunia pendidikan.
- b. Membekali siswa dengan teknologi informasi (IT) agar mampu mengakses berbagai informasi secara positif melalui internet/ICT.
- c. Melahirkan generasi berprestasi yang mampu bersaing di tingkat kota, provinsi, dan nasional dalam pengembangan bakat dan minat ekstrakurikuler.

4. Sasaran Sekolah

- a. Mengembangkan inovasi pembelajaran untuk meraih prestasi akademis dan nonakademis.
- b. Mampu mengembangkan pencapaian standar kelulusan maksimal.
- c. Mencapai standar pembelajaran yang berbasis ICT.
- d. Sekolah mencapai peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan.

5. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

a. Kepala sekolah dan Wakil Kepala Sekolah

Tabel 4.1
Nama Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah

No.	Jabatan	Nama	JK		Pendidikan Akhir
			L	P	
1.	Kepala Sekolah	Dra. Tutut Sri Wahyuni, M.M.Pd		√	S2
2.	Wakasek Kesiswaan	Any Setijowati, S.Pd		√	S1
3.	Wakasek Kurikulum	Dra. Elly Hartatiek, M.Pd		√	S2
4.	Wakasek Sarpras dan Humas	Suci Sri Wulandari, S.Pd		√	S1

(Sumber Profil SMP Negeri 3 Malang tahun pelajaran 2017/2018)

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pendidikan terakhir kepala sekolah dan wakilnya berarti sekolah tersebut bermutu. Salah satu tanda sekolah tersebut bermutu adalah sekolah tersebut memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompeten dibidangnya. Selain itu pendidikan terakhir dari para pendidik dan kependidikan minimal adalah Strata Satu (S-1).

b. Guru

Tabel 4.2
Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah dan Status Guru				Jumlah
		GT/PNS		GTT/Guru Bantu		
		L	P	L	P	
1.	S3/S2	2	6	-	-	8
2.	S1	8	20	9	2	39
3.	D-4	-	-	-	-	-
4.	D3/Sarmud	3	-	-	-	3
5.	D2	-	-	-	-	-
6.	D1	-	-	-	-	-
Jumlah		13	26	9	2	50

(Sumber Profil SMP Negeri 3 Malang tahun pelajaran 2017/2018)

Berdasarkan tabel di atas data guru SMP Negeri 3 Malang dapat diartikan memiliki guru berkualitas, karena dapat dilihat dari tingkat pendidikan guru. Tingkat pendidikan guru dapat menjadi acuan sekolah tersebut bermutu. Dengan memiliki tenaga pendidik yang berkompeten maka akan menghasilkan siswa siswi yang berkualitas.

Siswa siswi SMP Negeri 3 Malang berkualitas dapat dilihat dari beberapa prestasi yang didapatkan selama menjadi siswa siswi SMP Negeri 3 Malang. Prestasi yang didapatkan diantaranya olahraga. Selain itu prestasi yang didapatkan oleh siswa siswi SMP Negeri 3 Malang adalah berupa keilmuan atau dapat disebut dengan olimpiade. Lulusan yang dicetak oleh SMP Negeri 3 Malang mampu bersaing dengan sekolah lain.

c. Tenaga Kependidikan : Tenaga Pendukung

Tabel 4.3
Tenaga kependidikan

No.	Tenaga pendukung	Jumlah tenaga pendukung dan kualifikasi pendidikannya						Jumlah Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin				Jumlah
		≤ SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	PNS		Honorer		
								L	P	L	P	
1	Tata Usaha	1	2	-	-	-	3	2	-	2	2	6
2	Perpustakaan	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2
3	Laboran lab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	UKS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
5	Keamanan	-	2	-	-	-	1	-	-	3	-	3
6	Kebersihan	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	3
	Jumlah	1	8	-	-	1	5	2	-	8	4	15

(Sumber Profil SMP Negeri 3 Malang tahun pelajaran 2017/2018)

Tenaga kependidikan SMP Negeri 3 Malang dapat dilihat pada tabel di atas. Merupakan tenaga kependidikan yang dapat membantu berjalannya kegiatan sekolah dan membantu terwujudnya tujuan sekolah. Meskipun tenaga kependidikan SMP Negeri 3 Malang tidak semua pendidikan terakhir sarjana, akan tetapi dapat mewujudkan sekolah yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dapat dilihat dari bagian tata usaha, memiliki kualifikasi pendidikan terakhir S1 sebanyak 3 orang, SMA sebanyak 2 orang dan kurang lebih SMP sebanyak satu orang. Diantaranya yang menjadi PNS sebanyak 2 orang, honorer sebanyak 4 orang. Berdasarkan data di atas dapat dilihat tenaga kependidikan yang minim akan tetapi dapat bekerja secara maksimal dan membantu terwujudnya tujuan sekolah.

6. Data Siswa (5 tahun terakhir)

Tabel 4.4
Data Siswa

Th. Pelajaran	Kelas VII			Kelas VIII			Kelas IX			Jumlah (Kls VII + VIII+IX)		
	Jumlah siswa		Ro mb el	Jumlah siswa		Ro mb el	Jumlah siswa		Ro mb el	Jumlah siswa		Jml h
	L	P		L	P	8	L	P		L	P	
2013/2014	123	179	10	112	145	9	131	163	9	366	487	853
2014/2015	117	164	10	125	182	9	111	145	9	353	491	844
2015/2016	117	169	9	114	169	9	128	173	10	359	501	860
2016/2017	125	160	9	122	170	9	113	171	9	360	501	861
2017/2018	116	171	9	127	162	9	123	169	9	366	502	868

(Sumber Profil SMP Negeri 3 Malang tahun pelajaran 2017/2018)

Data siswa 5 tahun terakhir pada tabel di atas dapat dilihat adanya peningkatan, meskipun pada tahun pelajaran 2014/2015 mengalami penurunan sejumlah 9 siswa. Akan tetapi pada tahun selanjutnya selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa peminat SMP Negeri 3 Malang tinggi. Karena SMP Negeri 3 Malang merupakan sekolah favorit yang ada di Malang, dan merupakan salah satu sekolah yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dana BOS .

Berdasarkan pedoman teknis penggunaan dana BOS tahun 2018, dana BOS juga dapat digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. Dengan demikian siswa dapat mengembangkan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 3 Malang.

7. Data Keuangan Dana BOS

Tabel 4.5
Penerimaan dana

Nomor		Penerimaan	
Urut	Kode	Uraian	Jumlah
I	1	Bantuan Operasional Sekolah	
	1.1	BOS Pusat	
		868 siswa × Rp. 1000.000	Rp. 868.000.000,00
	1.2	BOS Provinsi	
	1.3	BOS Kabupaten / Kota	
JUMLAH			Rp. 868.000.000,00

(Sumber RKA SKPD tahun anggaran 2017)

Penerimaan dana SMP Negeri 3 Malang pada tahun ajaran 2017/2018 bersumber pada dana dari APBN berupa BOS sejumlah Rp. 868.000.000, dengan rincian 863 × Rp. 1000.000. Berdasarkan rincian tersebut pencairan dana BOS tidak sesuai dengan

perhitungan. Akan tetapi dana BOS yang cair pada tahun ajaran 2017/2018 adalah sebanyak Rp. 855.600.000 selisih antara ketentuan yang berlaku dengan penerimaan adalah sebanyak Rp. 12.400.000, akan tetapi hal itu tidak menjadi kendala bagi SMP Negeri 3 Malang.

Yang menjadi penanggung jawab dana BOS di SMP Negeri 3 Malang adalah Dra. Tutut Wahyuni, M.MPd selaku Kepala Sekolah. Bendahara Sekolah Dra. Ida Mutiawati sebagai pelaksana dan pengendali keuangan dana BOS. Semua pemasukan dan pengeluaran dicatat oleh bendahara sekolah sebagai bukti laporan keuangan dana BOS.

a. Pengalokasian dana BOS

Anggaran yang diperoleh sekolah dari pemerintah dialokasikan untuk kegiatan operasional sekolah. Penggunaan dana tersebut berdasarkan pada pedoman petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Diantara komponen kegiatan atau program yang dialokasikan menggunakan dana BOS adalah 9 standar.

Delapan standar tersebut diantaranya kompetensi lulusan, pengembangan kurikulum, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan implementasi manajemen sekolah pengembangan pembiayaan pendidikan dan pengembangan sistem penilaian.

Perencanaan yang dibuat oleh SMP Negeri 3 Malang berdasarkan pembiayaan belanja diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Berikut ini tabel yang menggambarkan perencanaan anggaran dana BOS selama satu tahun anggaran.

Tabel 4.6
Perencanaan anggaran dana BOS

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5 2 1	Belanja Pegawai	Rp. 128,849.000,00
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 605,009,300,00
5 2 3	Belanja Modal	Rp. 125,141,100,00
Jumlah		Rp. 858,999,400,00

(Sumber RKA SKPD tahun anggaran 2017)

Anggaran yang telah dibuat oleh SMP Negeri 3 Malang dialokasikan untuk kegiatan operasional sekolah guna unuk peningkatan kualitas SMP Negeri 3 Malang, serta untuk mengembangkan proses pendidikan. Dengan merencanakan anggaran sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan maka dapat meningkatkan kualitas sekolah.

b. Penggunaan dana BOS

Realisasi anggaran dana BOS SMP Negeri 3 Malang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Realisasi anggaran dana BOS

No. Urut	Program/Kegiatan	Jumlah
	Saldo Awal (Periode sebelumnya)	
1.1	Pengembangan kompetensi lulusan	Rp 20.720.500,00
1.2	Pengembangan standar isi	Rp 7.742.000,00
1.3	Pengembangan standar proses	Rp 96.777.600,00
1.4	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	Rp 1.550.000,00
1.5	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	Rp 371.519.500,00
1.6	Pengembangan standar pengelolaan	Rp 3.389.900,00
1.7	Pengembangan standar pembiayaan	Rp 335.200.600,00
1.8	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	Rp 18.699.900,00
	TOTAL	Rp 855.600.000,00

(Sumber Laporan LPJ BOS tahun anggaran 2017)

Berdasarkan tabel realisasi anggaran tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan dana BOS sebesar Rp. 855.600.000. Jumlah yang digunakan sesuai dengan dana BOS dari pemerintah yang diterima oleh pihak SMP Negeri 3 Malang. Realisasi anggaran dana BOS digunakan dengan baik, karena dapat dilihat bahwa antara dana yang diterima dapat mencukupi seluruh kebutuhan untuk mengoperasikan kegiatan sekolah secara maksimal.

B. Hasil penelitian

Pada bagian ini peneliti menyajikan data yang berhasil dihimpun dari lokasi penelitian melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan bendahara sekolah, kepala sekolah dan wali murid siswa.

Setelah dilakukan observasi di lapangan, peneliti melihat bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi dana bos dilakukan dengan baik dan sesuai dengan petunjuk penggunaan dana bos. Penggunaan petunjuk teknis dan melakukan prinsip akuntabilitas dan transparansi dana bos oleh

sekolah menjadikan sekolah tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat sehingga mendapatkan nilai positif.

Dalam penyajian data peneliti tetap berpijak pada rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana disebutkan pada bagian pertama.

1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah

Perencanaan anggaran merupakan kegiatan yang sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan anggaran yang disusun untuk merencanakan kegiatan atau program dalam waktu satu tahun. Penyusunan perencanaan berdasarkan atas kebutuhan dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang. Kegiatan yang diprioritaskan adalah kegiatan yang segera dibutuhkan atau kegiatan dalam jangka waktu pendek. Perencanaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah dilakukan oleh sekumpulan guru yang disusun oleh sekolah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Ida sebagai Bendahara SMP Negeri 3 Malang:

“Penyusun perencanaan anggaran dana BOS dilaksanakan oleh bapak ibu guru yang tergabung dalam 9 standar dan dipimpin oleh Kepala Sekolah. Sekumpulan guru penyusun perencanaan dapat disebut dengan perencana anggaran dana BOS SMP Negeri 3 Malang.”⁴⁰

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Tutut Sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Malang:

“Dalam kegiatan perencanaan anggaran dilakukan oleh guru yang tergabung dalam 9 standar dan Kepala Sekolah sebagai

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Dra. Ida Mutiawati selaku Bendahara Sekolah. Selasa, 22 Mei 2018

pemimpin dalam kegiatan tersebut. Kepala Sekolah sebagai Penanggung Jawab Utama dalam perencanaan anggaran dana BOS”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa, perencanaan anggaran dilakukan oleh satuan guru yang tergabung dalam 9 standar. Perencanaan tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam satu tahun anggaran. Kepala sekolah melakukan analisis biaya pendidikan yang akan dikeluarkan selama satu tahun ajaran. Kegiatan perencanaan anggaran tersebut dipimpin oleh Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab utama dalam perencanaan anggaran dana BOS. Sekolah merencanakan penggunaan keuangan dana BOS untuk kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun anggaran.

Dalam proses perencanaan dana BOS di SMP Negeri 3 Malang sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya tanggungjawab dari setiap penanggungjawab dari setiap kegiatan serta dalam proses pembuatan perencanaan mengikut sertakan seluruh komponen sekolah. Dengan demikian dapat memberikan informasi perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dalam waktu satu tahun kedepan.

Prosedur mendapatkan dana bos yaitu menyetorkan jumlah siswa kepada dinas pendidikan. Berdasarkan petunjuk teknis BOS pada tahun 2018, terdapat ketentuan anggaran yang akan diterima sekolah.

Hal ini sesuai dengan penjelasan bendahara sekolah:

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Dra. Tutut Sri Wahyuni, M.MPd selaku Kepala Sekolah. Jum’at, 06 Juli 2018

“Prosedur mendapatkan dana BOS dengan cara sekolah melaporkan jumlah siswa pada tahun anggaran. Dengan perincian jumlah siswa dikalikan dengan Rp. 1000.000; sama dengan jumlah dana BOS yang akan diterima oleh SMPN 3 Kota Malang. Akan tetapi jumlah tersebut tidak sama dengan pencairan dana BOS. Misalnya pada tahun anggaran 2017 jumlah siswa SMP Negeri 3 Malang 868 siswa dikalikan Rp. 1000.000 sama dengan Rp. 868.000.000. Akan tetapi jumlah dana yang dicairkan sebanyak Rp 855.600.000. Setiap sekolah tidak sama jumlah dana yang diterima sesuai dengan jumlah siswa dalam sekolah tersebut. Karena dana bos dapat memenuhi kebutuhan sekolah maka, tidak diperbolehkan untuk memungut biaya SPP dan juga biaya awal masuk sekolah, dan ini menjadi kebijakan dari pemerintah dilarang untuk memungut biaya dari siswa”⁴²

Dijelaskan juga oleh Kepala sekolah:

“Perencanaan pencairan dana BOS dilakukan dengan, sekolah melaporkan jumlah siswa pada tahun anggaran kepada dinas pendidikan. Sebelum dana BOS cair sekolah merencanakan anggaran selama satu tahun untuk merencanakan kegiatan dan mengoperasikan sekolah dengan menggunakan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis BOS”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu bendahara dan kepala sekolah, dapat di ketahui bahwa prosedur pencairan dana BOS dilakukan dengan sekolah menyetorkan jumlah siswa pada tahun anggaran. Berdasarkan jumlah siswa SMP Negeri 3 Malang, sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan maka jumlah siswa dikalikan dengan Rp. 1000.000.

Berdasarkan kebijakan tersebut pemerintah memberikan dana kepada setiap sekolah berdasarkan jumlah perhitungan. Pencairan dana terhadap setiap sekolah memiliki jumlah yang berbeda. Jumlah

⁴² Wawancara dengan Ibu Dra. Ida Mutiawati selaku Bendahara Sekolah. Selasa, 22 Mei 2018

⁴³ Wawancara dengan Ibu Dra. Tutut Sri Wahyuni, M.MPd selaku Kepala Sekolah. Jum’at, 06 Juli 2018

dana yang dicairkan dengan ketentuan yang berlaku tidak sesuai. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan dari Ibu bendahara sekolah.

Perbedaan antara ketentuan dana yang dicairkan dengan dana yang cair menyebabkan sekolah memperkecil anggaran dari setiap kegiatan atau setiap anggaran pengeluaran. Berdasarkan jumlah dana yang dicairkan tersebut harus dapat mencukupi semua kebutuhan siswa dan operasional sekolah. Hal ini dikarenakan sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya kepada siswa.

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah sudah menjadi kewajiban bagi setiap sekolah. Dana BOS diberikan untuk memenuhi kebutuhan siswa dan sekolah, oleh karena itu siswa tidak diperbolehkan untuk membayar SPP. Sekolah harus dapat mengelola dana BOS dengan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan sekolah selama satu tahun pelajaran. Pengelolaan dana BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Ida selaku bendahara sekolah:

“Untuk pengelolaan dana digunakan sesuai dengan juknis BOS yang telah ditetapkan. Penggunaan dana BOS tersebut untuk kegiatan siswa. Diantaranya kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan minat dan bakat siswa termasuk lomba – lomba baik tingkat kota, provinsi hingga internasional. Selain itu juga digunakan untuk pelatihan guru untuk meningkatkan mutu guru. Dengan terpenuhinya keuangan sekolah dengan adanya dana BOS maka biaya sekolah tidak dibebankan pada siswa. Hal tersebut sudah menjadi aturan dari pemerintah wajib belajar 9 tahun”⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Dra. Ida Mutiawati selaku Bendahara Sekolah. Selasa, 22 Mei 2018

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Siti selaku wali murid siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Malang:

“Biaya sekolah di SMP Negeri 3 Malang tergolong murah. Hal ini dapat lihat bahwa siswa tidak dipungut biaya apapun dari biaya awal masuk siswa hingga biaya SPP siswa. Tidak adanya pungutan biaya akan tetapi sekolah tersebut dapat dijamin mutu lulusan dari SMP Negeri 3 Malang tersebut”⁴⁵

Ungkapan serupa juga dari Ibu Tutut sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Malang

“SMP Negeri 3 Malang tidak memungut biaya apapun, karena sudah menjadi aturan dari pemerintah. Penerapan aturan tersebut harus dilakukan setiap sekolah atau lembaga pendidikan”⁴⁶

Berdasarkan hasil data di atas dapat diketahui bahwa penggunaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditentukan. Pihak sekolah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan yaitu tidak diperbolehkan untuk memungut biaya bulanan sekolah atau SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan). Penggunaan dana dalam kegiatan atau program sekolah harus dikelola dengan sebaik mungkin.

Penggunaan dana BOS yang dilakukan harus disertai dengan penyusunan laporan dana BOS terhadap pemerintah. Pertanggungjawaban dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah dilakukan secara online dan juga secara tertulis dengan diketahui kepala sekolah sebagai penanggungjawab. Sebagaimana disampaikan oleh bendahara sekolah:

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Siti selaku wali murid kelas VIII. Kamis, 24 Mei 2018

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Dra. Tutut Sri Wahyuni, M.MPd selaku Kepala Sekolah. Jum’at, 06 Juli 2018

“Pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan setiap tiga bulan sekali dilakukan secara online dalam aplikasi yang sudah tersedia sehingga pihak dinas dapat melihat secara langsung dan mengoreksi laporan dana BOS setiap sekolah. Selain itu sekolah membuat laporan keuangan dana BOS setiap tiga bulan sekali dan di tempel di majalah dinding sekolah sehingga semua warga sekolah dapat melihat. Semua laporan dana BOS yang telah disusun harus diketahui oleh Kepala Sekolah terlebih dahulu sebagai pengganggu jawab”.⁴⁷

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah:

“Pembuatan laporan keuangan dana BOS wajib diketahui terlebih dahulu oleh kepala sekolah sebelum dilaporkan secara online ataupun tertulis. Karena kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan dana BOS”⁴⁸

Proses akuntabilitas sekolah dilakukan dengan pembuatan laporan keuangan dana BOS tiga bulan satu kali dengan diketahui oleh Kepala Sekolah untuk dilaporkan ke dinas secara online, tertulis dan juga dalam bentuk print yang ditempel di majalah dinding sekolah.

Keterbukaan dalam pertanggung jawaban dana BOS sangat penting dilakukan oleh sekolah, karena dengan hal itu dapat menjadikan sekolah mendapat kepercayaan terhadap masyarakat dan meningkatkan mutu sekolah. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan wali murid kelas 8:

“Keterbukaan dalam pelaporan keuangan dana BOS dilakukan dengan menempel laporan keuangan dana BOS setiap triwulan di papan pengumuman sekolah. Setiap warga sekolah yang berada di sekolah dapat melihat laporan tersebut. Dengan adanya laporan keuangan dana BOS dapat meningkatkan kepercayaan wali murid. Tidak semua sekolah dapat melakukan hal tersebut, karena keuangan bersifat rahasia. Hal ini

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Dra. Ida Mutiawati selaku Bendahara Sekolah. Selasa, 22 Mei 2018

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Dra. Tutut Sri Wahyuni, M.MPd selaku Kepala Sekolah. Jum'at, 06 Juli 2018

menjadikan masyarakat menilai bahwa SMP Negeri 3 Malang merupakan sekolah yang bermutu”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sekolah yang melakukan prinsip akuntabilitas dengan baik maka sekolah tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Karena yang menilai sekolah tersebut bermutu yaitu masyarakat yang berada di sekitar sekolah dan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan dari sekolah tersebut.

Pelaporan secara terbuka yang dilakukan sekolah terhadap komponen sekolah dapat diketahui oleh wali murid secara langsung. Wali murid melihat laporan yang telah di umumkan di majalah dinding sekolah akan dapat mengetahui pengelolaan dan penggunaan dana BOS.

Pengarsipan dokumen keuangan SMP Negeri 3 Malang tergolong baik karena dalam pengarsipan tersebut tersedia almari khusus untuk data atau dokumen keuangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara:

“untuk pengarsipan dokumen keuangan yaitu dilakukan oleh bendahara sendiri, dikarenakan penanggung jawab utama dalam keuangan adalah Bendahara sekolah. Jadi ketika ada pemeriksaan atau audit dari pemerintah maka bendahara dapat menunjukkan dengan mudah.”

Hasil wawancara dengan bendahara sekolah tersebut maka dapat diketahui bahwa pengarsipan dokumen dan data-data penting mengenai keuangan disimpan sendiri oleh Bendahara. Pengarsipan yang dilakukan bertujuan untuk antisipasi kehilangan dokumen atau

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Siti selaku wali murid kelas VIII. Kamis, 24 Mei 2018

data. Karena ketika ada pengawas atau ada pemeriksaan dari pemerintah bendahara sekolah dapat dengan mudah menunjukkan dokumen atau data yang diminta.

Alasan dari penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dana BOS yaitu melaksanakan kebijakan dan merupakan kewajiban bagi setiap sekolah. Sedangkan manfaatnya adalah dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi dari pemerintah, masyarakat, wali murid siswa, dan warga sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat bendahara sekolah:

“alasan dari penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dana BOS yaitu sekolah melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan kewajiban tersebut maka sekolah harus melaksanakannya. Untuk manfaatnya yaitu dapat melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik, meningkatkan kepercayaan pemerintah, wali murid, siswa, warga sekolah dan juga masyarakat.”

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Ibu Kepala Sekolah:

“alasanya yaitu menerapkan kebijakan yang menjadi kewajiban bagi setiap sekolah dalam mengelola keuangan. Sedangkan manfaatnya yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik dari antara pemerintah, masyarakat, wali murid, siswa dan warga sekolah.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dilakukan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah yang bermanfaat untuk menciptakan kepercayaan dan partisipasi antara pemerintah, masyarakat, wali murid, siswa dan warga sekolah.

2. Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Informasi mengenai keterbukaan dalam pengelolaan keuangan sekolah, merupakan salah satu prinsip yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dalam menjalankan undang-undang sistem pendidikan nasional tentang pengelolaan dana pendidikan.

Pengelolaan dana pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Transparansi dalam pengelolaan keuangan di sekolah sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah dan menjadikan sekolah tersebut bermutu.

Prinsip transparansi dilakukan dimulai dari awal yaitu penganggaran dana BOS. Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh Ibu Ida selaku Bendahara SMPN 3 Kota Malang mengatakan bahwa:

“Perencanaan anggaran disusun oleh bapak ibu guru yang tergabung dalam 9 standar dilakukan awal tahun untuk merencanakan satu tahun anggaran. Keterbukaan dalam penganggaran ini dapat diketahui oleh semua guru dan diketahui oleh Kepala Sekolah bukan hanya bendahara. Untuk keterbukaan terhadap stakeholder (wali murid) biasanya diadakan pertemuan satu tahun sekali pada awal ajaran baru kelas VII”⁵⁰

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Siti:

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Dra. Ida Mutiawati selaku Bendahara Sekolah. Selasa, 22 Mei 2018

“Adanya rapat awal tahun yang di adakan oleh SMP Negeri 3 Malang membahas mengenai semua program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ajaran. Rapat ini dihadiri wali murid dikarenakan sekiranya membutuhkan kontribusi wali murid dalam perkembangan siswa siswi.”⁵¹

Berdasarkan pemaparan data di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa keterbukaan terhadap perencanaan anggaran dana bos sangat penting dilakukan, sehingga semua pihak sekolah mengetahui kebutuhan dan penggunaan dana bos di sekolah. Keterbukaan antar komponen sekolah atau warga sekolah akan menimbulkan dampak positif. Adanya ikatan saling percaya antar semua warga sekolah akan menyebabkan sekolah tersebut dapat dipercaya masyarakat luas.

Keterbukaan yang dilakukan oleh SMP Negeri 3 Malang dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dimaksudkan, untuk memberikan informasi anggaran dana yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran. Sehingga memberikan pemahaman kepada guru, karyawan, dan orang tua siswa serta saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Manfaat penting dari adanya transparansi anggaran yaitu meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu. Penganggaran untuk dana BOS digunakan untuk kegiatan siswa sebagaimana hasil wawancara dengan Bendahara sekolah yaitu:

“Anggaran yang telah disusun oleh sekolah untuk dana BOS rata-rata digunakan untuk kegiatan siswa selain itu untuk

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Siti selaku wali murid kelas VIII. Kamis, 24 Mei 2018

kebutuhan sekolah. Kegiatan siswa ini meliputi beberapa hal diantaranya, kegiatan lomba, kegiatan ekstrakurikuler, olimpiade dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk prestasi siswa dapat meningkat, sehingga jika prestasi siswa meningkat maka mutu sekoah akan meningkat juga”⁵²

Penggunaan dana BOS untuk kebutuhan sekolah dan kegiatan siswa dilakukan untuk meningkatkan mutu sekolah. Tidak hanya itu prinsip yang dilakukan oleh sekolah dalam pertanggung jawaban dan transparansi dana BOS dapat meningkatkan mutu sekolah. Keterbukaan dalam penggunaan dana BOS dilakukan sekolah untuk dapat meningkatkan mutu sekolah.

Laporan penggunaan dana juga disebut dengan pertanggung jawaban dana BOS di laporkan setiap tribulan terhadap diknas secara online dan juga tertulis. Selain itu sekolah melakukan keterbukaan dalam penggunaan keuangan di sekolah yaitu di tempel pada majalah dinding sekolah. Sehingga siapaun yang berada di sekolah dapat mengetahui penggunaan dana BOS setiap tiga bulan sekali. Hal itu juga dijelaskan oleh Ibu Siti selaku wali murid kelas VIII:

“Laporan keuangan dana BOS yang di tempel pada majalah dinding sekolah atau papan pengumuman dapat diketahui oleh wali murid ketika berada di sekolah. laporan tersebut dapat membuat wali murid memberikan kepercayaan terhadap sekolah. Hal ini menjadikan SMP Negeri 3 Malang menjadi kepercayaan masyarakat. Salah satu ciri sekolah yang bermutu adalah sekolah yang dapat memperlihatkan laporan keuangan dana BOS”⁵³

berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa

⁵² Wawancara dengan Ibu Dra. Ida Mutiawati selaku Bendahara Sekolah. Selasa, 22 Mei 2018

⁵³ Wawancara dengan Ibu Siti selaku wali murid kelas VIII. Kamis, 24 Mei 2018

keterbukaan dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan sekolah dapat meningkatkan mutu sekolah. Karena tidak semua sekolah dapat melakukan prinsip tersebut. Hal ini dapat diketahui bahwa tidak semua sekolah transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah.

C. Temuan Hasil Penelitian

1. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam perencanaan dan penggunaan anggaran dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis. Selanjutnya, SMP Negeri 3 Malang membuat laporan keuangan dana BOS untuk dinilai dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan yaitu pemerintah dan wali murid yang dilakukan setiap triwulan. Sedangkan untuk mengevaluasi laporan tersebut dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah. Dengan adanya keterlibatan dari beberapa pihak baik internal maupun eksternal maka SMP 3 Malang dapat menjadi kepercayaan masyarakat. Hal ini menjadikan SMP Negeri 3 Malang memiliki kualitas yang baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa SMP Negeri 3 Malang melakukan prinsip akuntabilitas. Dalam pengarsipan dokumen keuangan dilakukan oleh Bendahara Sekolah. dengan tujuan Bendahara dapat dengan mudah memeriksa dan mengelola dokumen yang berkaitan dengan keuangan sekolah. Alasan dan manfaat sekolah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan selain itu dapat meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat terhadap sekolah tersebut.

2. Penerapan transparansi dalam perencanaan keuangan dilakukan dengan perencanaan anggaran oleh beberapa guru yang tergabung dalam 9 standar dipimpin oleh kepala sekolah dan kegiatan awal tahun oleh wali murid. Rapat kerja tersebut membahas program/kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran, program/kegiatan yang direncanakan harus sesuai dengan kebutuhan. Rapat perencanaan anggaran juga dihadiri oleh wali murid sehingga dalam hal perencanaan anggaran dan kegiatan dilakukan secara terbuka. Sedangkan dalam penggunaan dana BOS dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap setiap sekolah. Laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan ke dinas secara online sehingga, semua orang yang dapat mengakses dapat melihat laporan keuangan dana BOS SMP Negeri 3 Malang. Keterbukaan dalam pelaporan keuangan dilakukan sekolah dengan membuat laporan keuangan dan ditempel di majalah dinding sekolah sehingga semua yang berada di SMP Negeri 3 Malang dapat melihat secara langsung laporan keuangan dana BOS setiap triwulan. Dengan keterbukaan informasi mengenai keuangan maka SMP Negeri 3 Malang ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan dianggap sebagai sekolah yang bermutu.

BAB V

PEMBAHASAN

Dari deskripsi dan penyajian data yang telah penulis uraikan sebelumnya berdasarkan realitas yang ada, maka penulis pada bab ini akan menyajikan pembahasan yang diperoleh dari penelitian lapangan yang disesuaikan dengan tujuan dalam penelitian ini.

A. Analisis Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri

3 Malang

Biaya Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.⁵⁴

Bantuan Operasional Sekolah merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada sekolah. Dengan tujuan untuk kegiatan operasional sekolah dan program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan. Dengan adanya dana BOS sekolah tidak diperbolehkan untuk memungut biaya apapun terhadap siswa.

⁵⁴ Permendikbud No. 1 tahun 2018 Pasal 1 ayat 2 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah hal 4

1. Perencanaan dana BOS

Penyusunan perencanaan dana BOS di SMP Negeri 3 Malang di mulai dengan penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah). Sekolah membuat perencanaan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam satu tahun anggaran. Penyusunan anggaran dilakukan oleh bapak ibu guru yang tergabung dalam 9 standar dengan dihadiri kepala sekolah sebagai penanggungjawab utama.

Bapak ibu guru yang tergabung dalam 9 standar yaitu bapak ibu guru yang memiliki tanggung jawab dari setiap kegiatan. Diantaranya waka sarana dan prasarana, dalam kegiatan perencanaan anggaran ini waka sarana dan prasarana beserta anggotanya merencanakan kebutuhan satu tahun anggaran. Kebutuhan yang harus di beli atau harus diperbaiki. Kebutuhan sarana dan prasarana berguna untuk menunjang kegiatan pembelajaran siswa dan kenyamanan siswa dalam belajar.

Waka kurikulum beserta anggotanya melakukan perencanaan buku yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Diantaranya buku pegangan siswa, buku panduan guru dan buku bacaan yang diletakkan di perpustakaan. Kebutuhan tersebut bertujuan untuk menunjang kebutuhan siswa, agar siswa dapat belajar dengan nyaman. Hal ini dapat di ketahui bahwa perencanaan anggaran yang di gunakan untuk mencukupi kebutuhan siswa dan sekolah.

Waka kesiswaan melakukan perencanaan mengenai pendaftaran siswa baru serta kelulusan. Pendaftaran siswa baru dan kelulusan memerlukan perencanaan diantaranya, susunan panitia, administrasi pendaftaran, dan konsumsi panitia. Hal ini menunjukkan adanya anggaran yang direncanakan untuk mencukupi kebutuhan tersebut.

Selain perencanaan anggaran bapak dan ibu guru yang tergabung dalam 9 standar juga merencanakan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Perencanaan tersebut juga berkaitan dengan anggaran yang akan dikeluarkan.

Keikutsertaan kepala sekolah dalam penyusunan perencanaan adalah sebagai penanggungjawab utama dalam pengelolaan dana BOS. Penanggungjawab utama harus mengetahui mulai dari perencanaan, pengelolaan dan proses pelaporan serta pertanggungjawaban terhadap pemerintah. Sehingga peran kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan sangat penting.

Setiap sekolah wajib menyusun RAPBS sebagaimana diamanatkan dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu “Rencana Kerja Tahunan hendaknya memuat rencana anggaran pendapat dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun,” RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan

rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran.⁵⁵

Berdasarkan teori di atas peneliti menggunakan metode wawancara dalam menggali informasi mengenai kegiatan perencanaan anggaran. Dalam kegiatan perencanaan dilakukan oleh beberapa guru yang tergabung dalam 9 standar yang telah ditentukan. Ketika kegiatan perencanaan dilaksanakan kepala sekolah bersama sama dengan Tim dana BOS menganalisis kebutuhan untuk menaksir biaya pendidikan yang dikeluarkan selama satu tahun anggaran.

Pembuatan RKA di SMP Negeri 3 Malang sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat berdasarkan adanya tanggungjawab dari setiap penanggungjawab kegiatan yang telah di rencanakan dan di dalam pembuatannya melibatkan seluruh komponen sekolah. Dengan demikian kegiatan perencanaan dilakukan dengan keterbukaan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perencanaan dana BOS di SMP Negeri 3 Malang dalam proses penyusunannya, keikutsertaan komponen sekolah dan Tim dana BOS dapat mencerminkan transparansi pengelolaan dana sesuai dengan teori prinsip manajemen keuangan sekolah.

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa

⁵⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah* (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), hal. 228.

pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.⁵⁶

Berdasarkan paparan data di atas dapat kita ketahui bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan oleh SMP Negeri 3 Malang sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat diketahui dengan adanya keterlibatan komponen sekolah, Tim dana BOS dan kepala sekolah sebagai penanggungjawab utama.

Penyusunan perencanaan dilakukan sekolah sebelum menerima dana BOS. Perencanaan kegiatan atau program yang akan dilakukan selama satu tahun anggaran. Prosedur selanjutnya ialah pencairan dana BOS terhadap setiap sekolah. Setiap sekolah melaporkan kepada pemerintah jumlah siswa pada tahun anggaran.

Perhitungan jumlah dana BOS untuk sekolah dilakukan dengan beberapa ketentuan. Sekolah dengan jumlah peserta didik 60 atau lebih penghitungan jumlah BOS yaitu pada tingkat SMP/Sekolah Terintegrasi/SMP Satap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan jumlah peserta didik.⁵⁷

Berdasarkan kebijakan di atas maka, perhitungan alokasi dana BOS yang diberikan kepada setiap sekolah yaitu jumlah siswa dikalikan dengan Rp. 1000.0000;. Setiap sekolah memiliki jumlah siswa yang berbeda sehingga dana BOS yang dicairkan terhadap setiap sekolah

⁵⁶ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah* (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), hal. 218.

⁵⁷ Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah hal 48

memiliki perbedaan. Hal itu disesuaikan dengan jumlah siswa setiap sekolah.

Alokasi dana BOS untuk SMP Negeri 3 Malang dalam hitungan satu tahun dan dihitung setiap siswa mendapatkan Rp. 1000.000; pada tahun ajaran 2016/2017 jumlah siswa SMPN 3 Kota Malang berjumlah 868 siswa \times Rp. 1000.000; = Rp. 868.000.000;

Berdasarkan jumlah perhitungan dana BOS yang dicairkan maka SMP Negeri 3 Malang mendapatkan Rp. 868.000.000; akan tetapi hal itu tidak sesuai dengan dana yang dicairkan. SMP Negeri 3 Malang mendapatkan dana BOS Rp. 855.600.000; dari alokasi dana Rp. 868.000.000;. Hal ini menunjukkan ketidaksamaan antara alokasi dana yang sudah ditentukan dengan dana yang dicairkan terhadap setiap sekolah.

Perbedaan antara alokasi sesuai dengan ketentuan dan alokasi dana sesuai dengan pencairan dana, maka sekolah harus dapat mengelola keuangan dana BOS dengan baik sehingga dapat tercukupi kebutuhan untuk kegiatan atau program serta kebutuhan yang lainnya. Dana BOS yang cair harus dapat mencukupi semua kebutuhan siswa dan operasional sekolah. Setiap anggaran yang direncanakan harus diperkecil dan setiap pengeluaran sehingga dana BOS yang cair mencukupi kebutuhan sekolah akan tetapi tetap memperhatikan mutu siswa dan mutu sekolah. Hal ini dikarenakan sekolah tidak

diperbolehkan meungut biaya terhadap siswa sesuai dengan kebijakan dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS.

Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah, maka sekolah harus melakukan revisi/*update* data pada Dapodik agar sesuai dengan jumlah peserta didik *riil* di sekolah sebelum batas waktu *cut off* data perhitungan lebih kurang salur. Apabila BOS di KUD masih mencukupi, kekurangan salur di sekolah dapat langsung diselesaikan. Tapi bila dana di KUD tidak mencukupi, Tim BOS Provinsi mengajukan laporan kekurangan kepada Tim BOS Pusat melalui laporan penyaluran untuk disampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar pencairan dana cadangan.⁵⁸

Berdasarkan kebijakan tersebut akan menjadi solusi bagi sekolah jika terjadi kekurangan dana yang dicairkan. Sekolah dapat melakukan revisi/*update* data jumlah siswa kepada Dapodik agar sesuai dengan jumlah peserta didik yang benar di SMP Negeri 3 Malang. Pencairan dana BOS yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan ketentuan akan tetapi SMP Negeri 3 Malang dapat mengalokasikan dana dengan baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Adanya solusi yang dijelaskan di atas maka sekolah pada tahun selanjutnya akan mendapatkan dana sesuai dengan ketentuan.

⁵⁸ Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah hal 42

2. Penggunaan dana BOS

Penggunaan dana BOS di SMP Negeri 3 Malang dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penerapan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya SMP Negeri 3 Malang ketika akan menggunakan dana BOS harus mendapatkan kesepakatan kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama.

Berdasarkan Pedoman Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS yang diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Pengembangan perpustakaan
- b. Penerimaan Peserta Didik Baru
- c. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
- d. Kegiatan evaluasi pembelajaran
- e. Pengelolaan sekolah
- f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah
- g. Langganan daya dan jasa
- h. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana
- i. Pembayaran honor
- j. Pembelian atau perawatan alat multi media pembelajaran

k. Biaya lainnya⁵⁹

Penggunaan dana BOS berdasarkan petunjuk teknis terdapat beberapa komponen komponen kegiatan. Diantaranya adanya pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan mahasiswa baru mulai dari pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang serta kegiatan lain yang berkaitan secara langsung misal konsumsi panitia dan lain sebagainya.

Pengelolaan dana BOS juga digunakan untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler sekolah, serta memenuhi kebutuhan untuk lomba-lomba yang diikuti. Perlombaan antar sekolah tersebut baik dalam kota, luar kota, tingkat provinsi hingga internasional. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan mutu siswa. Siswa yang bermutu akan dapat meningkatkan mutu sekolah.

Dana yang diterima dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sekolah mulai dari buku untuk pembelajaran, buku panduan guru, buku untuk perpustakaan, barang habis pakai, kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, lomba dalam dan luar kota, dan lain sebagainya.

Selain itu penggunaan BOS dialokasikan untuk pelatihan guru guna untuk meningkatkan mutu guru. Peningkatan mutu guru bertujuan untuk dapat menjadikan siswa yang berprestasi. Sehingga dengan guru yang bermutu maka dapat menjadikan siswa yang prestasi. Siswa yang

⁵⁹ Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah hal 57-69

berprestasi akan dapat menjadikan sekolah yang bermutu. Salah satu ciri sekolah tersebut bermutu adalah memiliki siswa dan lulusan yang berprestasi.

Dana BOS dapat memenuhi kebutuhan sekolah dalam melaksanakan kegiatan dan program. Dengan terpenuhinya semua kegiatan maka sekolah tidak diperbolehkan untuk memungut biaya terhadap siswa. Hal ini menjadi aturan pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun, sehingga siswa SMP Negeri 3 Malang di bebaskan dari biaya sekolah.

Berdasarkan tujuan dana BOS yaitu membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat serta membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua atau walinya tidak mampu.⁶⁰ Hal ini menunjukkan bahwa sekolah tidak diperbolehkan untuk memungut biaya terhadap siswa.

SMP Negeri 3 Malang dapat menerapkan petunjuk teknis dana BOS dengan baik. Hal ini peneliti dapat mengetahui melalui wawancara dengan salah satu wali murid SMP Negeri 3 Malang. Biaya sekolah di SMP Negeri 3 Malang tergolong murah, dikarenakan SMP Negeri 3 Malang tidak memungut biaya terhadap siswa. Dana BOS dapat memenuhi semua kebutuhan kegiatan dan program sekolah.

⁶⁰ Permendikbud No. 1 tahun 2018 Pasal 1 ayat 2 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah hal 10

Pendanaan SMP Negeri 3 Malang berasal dari dana BOS tanpa adanya pungutan biaya terhadap siswa. Akan tetapi SMP Negeri 3 Malang dapat menjamin mutu siswa dan kompetensi lulusan. Penggunaan dana yang baik akan dapat memenuhi semua kebutuhan operasional sekolah.

Hal ini menunjukkan bahwa SMP Negeri 3 Malang dapat menerapkan petunjuk teknis BOS dengan baik. Penerapan tersebut juga akan dapat meningkatkan mutu sekolah. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu ciri sekolah yang bermutu.

3. Pertanggungjawaban dana BOS

Dalam pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer.⁶¹

Pelaporan dana BOS di SMP Negeri 3 Malang terdiri dari pelaporan terhadap pihak internal maupun pihak eksternal sekolah. pihak internal sekolah meliputi pembuatan laporan secara tertulis yang dapat diketahui oleh pihak dalam sekolah sendiri, misalnya guru dapat mengetahui laporan penggunaan dana BOS. Sedangkan pihak eksternal dapat mengetahui laporan dengan pembuatan laporan keuangan selanjutnya

⁶¹ Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah hal 115

dipublikasikan, sehingga pihak eksternal sekolah dapat mengetahui laporan keuangan sekolah.

Keterbukaan dalam pelaporan keuangan dana BOS dilakukan dengan menempel laporan keuangan dana BOS setiap triwulan di papan pengumuman atau majalah dinding sekolah. Hal ini dilakukan sekolah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS yaitu harus transparan terhadap laporan keuangan dana BOS. Selain itu sekolah menciptakan kepercayaan masyarakat khususnya wali murid terhadap sekolah. Kepercayaan masyarakat tersebut akan dapat meningkatkan mutu sekolah, karena tidak semua sekolah dapat melakukan keterbukaan terhadap laporan keuangan dana BOS.

Selain itu pelaporan secara tertulis dan pelaporan secara online. Pelaporan tersebut dilakukan setiap triwulan, terhadap pihak internal dan eksternal sekolah. Pelaporan secara tertulis dilakukan bendahara sekolah setiap satu bulan sekali dengan diketahui kepala sekolah. Setiap pengeluaran dan pemasukan dicatat dalam buku kas.

Selain laporan tertulis yang digunakan untuk sekolah sendiri sekolah juga mencetak laporan tersebut kemudian menempelkan di papan pengumuman sekolah, sehingga semua orang yang ada disekolah dapat mengetahui laporan keuangan sekolah.

Pelaporan yang dilakukan secara tertulis menjadi laporan pribadi sekolah yang menjadi arsip ketika adanya audit. Sedangkan laporan

secara online dilaporkan setiap tiga bulan kepada web laman BOS yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Pelaporan tersebut dapat menjadi pertanggungjawaban sekolah terhadap pemerintah atas penggunaan dana BOS yang dioperasikan untuk kegiatan siswa dan kegiatan sekolah. SMP Negeri 3 Malang melakukan pertanggung jawaban dengan membuat laporan sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa SMP Negeri 3 Malang sudah melakukan pertanggungjawaban dengan baik.

SMPN 3 Kota Malang melakukan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dengan tulis tangan maupun komputer, sehingga ada dokumen *hard file* dan juga *soft file*. Dengan adanya laporan yang dibuat dengan tulis tangan dan juga komputer dapat mengurangi resiko kehilangan dokumen laporan keuangan dana BOS.

Pelaporan dana BOS dilakukan dengan pemeriksaan kepala sekolah terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan peran kepala sekolah terhadap keuangan dana BOS sangat penting. Penanggungjawab utama pengelolaan dana BOS sekolah adalah kepala sekolah. Setiap bula sekolah membuat laporan keuangan dan harus diketahui kepala sekolah. Pelaporan keuangan dana BOS terhadap dinas sebelum dilakukan maka harus diperiksa terlebih dahulu oleh kepala sekolah.

Peran kepala sekolah sebagai penanggungjawab, dapat dilihat dalam proses perencanaan hingga pelaporan. Pantauan kepala sekolah akan

dapat memberikan masukan atau koreksi terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan. Hal ini dapat diketahui sebelum bendahara melaporkan pengelolaan dana Bos terhadap dinas maka harus ada pemeriksaan yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Berdasarkan paparan data di atas dapat menunjukkan bahwa pelaporan dana bos di SMP Negeri 3 Malang sudah menerapkan petunjuk teknis dana BOS. Hal ini menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan dana BOS SMP Negeri 3 Malang tergolong baik.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.⁶² Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga pendidikan untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban kepada stakeholder bukan hanya pertanggungjawaban kepada pemerintah. Dari tuntutan tersebut SMPN 3 Kota Malang melakukan prinsip akuntabilitas.

Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan di sekolah. Akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan keuangan sekolah menjadi berkualitas dan dapat dipercaya. Penerapan prinsip akuntabilitas di SMPN 3 Kota Malang dilakukan dengan melakukan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana BOS. Sekolah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas harus mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta berorientasi terhadap pencapaian visi, misi, tujuan serta manfaat.

⁶² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2002), hal. 18.

Penyusunan laporan keuangan dana BOS SMP Negeri 3 Malang dilakukan setiap bulan secara tertulis dan setiap triwulan secara online. Semua proses pengeluaran dan pemasukan keuangan dana BOS harus diketahui Bendahara Sekolah dan harus dibukukan dalam Buku Kas Umum. Semua pengarsipan keuangan menjadi tanggungjawab Bendahara Sekolah. Laporan berisikan jumlah dana Bos yang diterima dan laporan realisasi penggunaan dana BOS.

Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS ini merupakan rekapitulasi penggunaan BOS berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari BOS yang diterima sekolah pada tahun berkenaan.⁶³

Dengan adanya laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban sekolah kepada pihak pemerintah. SMP Negeri 3 Malang harus memiliki sistem informasi manajemen dan memonitoring hasil yang telah dicapai. Sistem informasi manajemen tersebut berupa laporan keuangan dalam memberikan hasil evaluasi anggaran.

Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, setiap sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah yang menerima BOS wajib melaporkan seluruh belanja yang telah dilakukan, termasuk hasil pembelian barang yang menjadi aset pemerintah daerah. Hasil pembelian barang yang dilaporkan merupakan

⁶³ Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah hal 116

pembelian barang yang dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari BOS yang diterima pada tahun berkenaan.⁶⁴

Selain laporan yang disimpan di sekolah sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Sekolah juga harus menyampaikan dokumen laporan kepada Dinas Pendidikan. Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut merupakan kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan.⁶⁵

Selain laporan berupa dokumen cetak yang disampaikan ke dinas pendidikan, Tim BOS Sekolah juga harus menyampaikan laporan penggunaan dana secara online ke laman BOS <http://bos.kemdikbud.go.id>. Informasi penggunaan dana yang disampaikan sebagai laporan online merupakan informasi yang didapat dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan.⁶⁶

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pembuatan laporan keuangan dana BOS berupa dokumen cetak dan dokumen berupa file. Proses pelaporan dana BOS dilakukan secara online dan juga secara langsung. Pelaporan dana BOS secara online dilakukan sekolah dengan membuka laman BOS. Laporan online tersebut dapat diketahui oleh pemerintah secara langsung.

Laporan keuangan yang dibuat berupa dokumen cetak maupun online merupakan laporan penggunaan dana BOS setiap triwulan. Setiap triwulan sekolah melaporkan penggunaan keuangan dana BOS,

⁶⁴ Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah hal 117

⁶⁵ Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah hal 117

⁶⁶ Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah hal 118

hal ini menunjukkan bahwa SMP Negeri 3 Malang mengikuti petunjuk teknis dana BOS. Pembuatan laporan yang sedemikian dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan sekolah yang berkualitas akan menjadikan sekolah dapat dipercaya oleh masyarakat.

4. Pengarsipan dokumen keuangan dana BOS

Pengarsipan laporan keuangan di SMPN 3 Kota Malang dilakukan oleh Bendahara Sekolah. Dokumen yang berkaitan dengan keuangan semua diarsipkan oleh bendahara dalam satu tempat yang berisi berkas keuangan. Segala bentuk dokumen keuangan diarsipkan oleh bendahara sehingga ketika ada pengawas atau pemeriksa menanyakan dokumen tersebut bendahara dapat menunjukkan.

Dokumen atau data-data mengenai keuangan disimpan oleh bendahara sekolah untuk mengantisipasi kehilangan dokumen atau data-data keuangan, baik keuangan sekolah maupun keuangan dana BOS. Hal ini dilakukan oleh SMP Negeri 3 Malang dengan baik sehingga ketertiban dokumen atau data keuangan dapat dijamin.

5. Alasan dan Manfaat penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dana BOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah mengenai alasan penerapan prinsip tersebut adalah sebagai bentuk kewajiban dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Sehingga

setiap sekolah memiliki kewajiban dalam mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 mengenai pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.⁶⁷

Berdasarkan teori dan hasil penelitian maka setiap sekolah memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan manfaat dari penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dana BOS bagi SMP Negeri 3 Malang yaitu dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dari beberapa pihak diantaranya pemerintah, masyarakat, wali murid, siswa, dan warga sekolah.

Menurut Sri Minarti manfaat dari penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua, siswa, dan warga sekolah.⁶⁸

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut maka adanya manfaat bagi sekolah itu memang benar adanya.

Kepercayaan itu timbul ketika sekolah menyediakan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Dengan kepercayaan yang tinggi maka sekolah akan dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi dalam pengelolaan manajemen

⁶⁷ Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48

⁶⁸ Sri Minarti, Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011). hlm 224

sekolah. Sekolah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan bagi masyarakat.

B. Analisis Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri

3 Malang

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.⁶⁹ Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dalam memperoleh informasi mengenai keuangan sekolah. Baik pihak internal sekolah maupun pihak eksternal sekolah.

1. Perencanaan dana BOS secara terbuka

Perencanaan anggaran dana BOS oleh kumpulan guru yang tergabung dalam 9 standar dan dipimpin oleh kepala sekolah sebagai penanggungjawab. Perencanaan anggaran tersebut dapat dikatakan terbuka karena bapak ibu guru dapat mengetahui dan mengusulkan kegiatan atau program yang akan dilakukan selama satu tahun.

Keterlibatan *stakeholders* dalam pembuatan perencanaan anggaran merupakan bentuk partisipasi yang mencerminkan transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Proses pembuatan rencana anggaran merupakan usulan dari bawah, proses tersebut memberikan kesempatan

⁶⁹ Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2002), hlm. 18.

kepada *stakeholder* untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan rencana anggaran.

Keterlibatan *stakeholder* salah satunya ialah keikutsertaan wali murid dalam perencanaan kegiatan atau program. Keterbukaan informasi keuangan juga dibutuhkan oleh wali murid karena dengan adanya keterbukaan keuangan sekolah maka kepercayaan terhadap sekolah semakin tinggi. Kegiatan perencanaan yaitu sekolah mengadakan pertemuan wali murid yang membahas mengenai beberapa program dan kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan anggaran bersama dengan wali murid dilakukan pada awal tahun ajaran baru kelas VII.

Perencanaan kegiatan atau program bersama wali murid dilaksanakan agar antar keduanya memiliki hubungan yang baik. Wali murid juga dapat mengusulkan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan. Kerjasama antara wali murid dan sekolah dapat meningkatkan kualitas anak, kegiatan yang direncanakan juga membutuhkan kontribusi wali murid dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang direncanakan. Sehingga adanya wali murid dalam perencanaan adalah untuk mendukung kegiatan atau program yang telah dibuat bersama-sama.

Perencanaan keuangan sekolah membahas seluruh program/kegiatan dan kebutuhan sekolah. Kegiatan atau program tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan mutu siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan

menyongkong kebutuhan operasional sekolah. Perencanaan yang matang akan dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran.

Perencanaan Anggaran dan kegiatan yang telah dibuat dialokasikan untuk kegiatan siswa dan program yang berkaitan dengan siswa serta kebutuhan sekolah. Penggunaan dana tersebut digunakan untuk meningkatkan mutu peserta didik, karena siswa yang bermutu akan menjadikan sekolah bermutu. Hal ini menunjukkan penggunaan dana BOS SMP Negeri 3 Malang berdasarkan petunjuk teknis dana BOS.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi perencanaan keuangan sudah cukup baik. Hal itu dapat kita ketahui bahwa ketebukaan informasi di SMPN 3 Kota Malang diterapkan dengan baik. Adanya keterlibatan *stakeholder* dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip transparansi keuangan

2. Penggunaan dana BOS sesuai dengan pos anggaran

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan program dan penggunaan BOS, sekolah harus menyusun dan mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap.⁷⁰ Pembuatan laporan penggunaan dana BOS dilakukan setiap triwulan. Setiap sekolah wajib membuat laporan penggunaan dana BOS dan mempertanggung jawabkannya.

⁷⁰ Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah hal 118

Penggunaan dana BOS dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dan berdasarkan pada dana yang diperoleh dari pemerintah. Dana tersebut harus dapat mencukupi kebutuhan sekolah dan 9 standart yang telah ditentukan. Sekolah dituntut kemampuannya untuk mengelola keuangan sehingga dana yang diberikan dapat mencukupi semua kebutuhan sekolah dan kebutuhan siswa.

Selain itu, pada tahap pelaksanaan anggaran, penerapan keterbukaan atau transparansi adalah dengan keterlibatan guru karyawan dan siswa dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Juga keterlibatan guru dan karyawand alam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana BOS.

3. Publikasi laporan penggunaan dana BOS

Dokumen yang digunakan adalah laporan rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan komponen pembiayaan BOS sebagaimana dimaksud dalam huruf 2.b di atas. Laporan ini harus dipublikasikan setiap triwulan mengikuti periode pembuatan laporan tersebut. Publikasi laporan dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.⁷¹

Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan SMPN 3 Kota Malang dilakukan setiap bulan sebagai laporan sekolah pribadi. Laporan yang dibuat setiap bulan oleh bendahara sekolah selanjutnya

⁷¹ Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah hal 118-119

diperiksa oleh kepala sekolah sebagai penanggungjawab utama pengelolaan dana BOS.

Keterbukaan laporan penggunaan keuangan dana BOS yang ditempel pada majalah dinding sekolah dilakukan setiap triwulan. Dengan adanya laporan keuangan tersebut semua warga sekolah dapat melihat. Adanya publikasi laporan keuangan dana BOS berarti SMPN 3 Kota Malang melakukan prinsip transparansi.

Berdasarkan penggunaan dana BOS maka sekolah membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan tersebut disusun setiap triwulan dan di tempel pada papan pengumuman sekolah atau majalah dinding sekolah. Keterbukaan laporan keuangan dapat diketahui oleh semua orang yang berada di sekolah. Bukan hanya guru dan siswa yang mengetahui akan tetapi wali murid juga mengetahui laporan keuangan dana BOS tersebut.

Laporan penggunaan dana BOS tersebut dapat diketahui oleh wali murid bertujuan untuk dapat meningkatkan kepercayaan wali murid terhadap sekolah. Kepercayaan wali murid akan dapat menjadikan hubungan yang baik antara sekolah dengan wali murid. Kepercayaan tersebut juga dapat meningkatkan mutu sekolah, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu wali murid SMP Negeri 3 Malang.

Salah satu ciri sekolah yang bermutu adalah memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan yang baik menurut

kebijakan adalah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS. Hal ini dapat diketahui bahwa SMP Negeri 3 Malang merupakan sekolah yang menerapkan prinsip dengan baik.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti pada Bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana BOS oleh SMP

Negeri 3 Malang

a. Perencanaan dana BOS

Perencanaan dana BOS dilakukan dengan baik hal ini dapat diketahui dengan adanya RKA selama satu tahun anggaran.

b. Penggunaan dana BOS

Penggunaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS yang menjadi kebijakan pemerintah

c. Pertanggungjawaban dana BOS

Pertanggungjawaban dengan melakukan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan adanya pertanggung jawaban tersebut sekolah menjadi sekolah yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat khususnya warga sekolah.

d. Pengarsipan dokumen keuangan

Pengarsipan laporan keuangan dan dokumen atau data-data keuangan dilakukan oleh Bendahara Sekolah

e. Alasan dan Manfaat

Alasan sekolah menerapkan akuntabilitas dan transparansi adalah melaksanakan kewajiban sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Sedangkan manfaat bagi SMP Negeri 3 Malang menerapkan prinsip tersebut adalah dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi antar berbagai pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, wali murid, siswa, dan warga sekolah.

2. Penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana BOS dilakukan

a. Perencanaan dana BOS secara terbuka

Perencanaan dilakukan secara terbuka dengan keikutsertaan para komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah sebagai penanggungjawab hingga wali murid siswa.

b. Penggunaan dana BOS sesuai dengan pos anggaran

Penggunaan dana BOS dilakukan dengan terbuka hal ini dapat diketahui bahwa pada proses penyusunan laporan pertanggung jawaban dilakukan bersama dengan guru yang tergabung dalam 9 standar yang telah ditentukan.

c. Publikasi laporan penggunaan dana BOS

Pertanggung jawaban dana BOS dilakukan dengan pembuatan laporan keuangan secara triwulan. Publikasi laporan dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu proses pelaporan juga dilaporkan secara online pada laman BOS.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, perlu kiranya peneliti memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pengelola BOS diharapkan untuk terus memantau penggunaan dana BOS, dan melakukan pemantauan terhadap proses akuntabilitas keuangan agar dapat melaksanakan aturan-aturan yang berlaku sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang berkualitas dan menjadikan sekolah bermutu.
2. Dalam pelayanan pendidikan hendaknya semua lembaga pendidikan khususnya yang mendapatkan dana BOS agar berusaha untuk meminimalisir adanya pemungtan biaya pendidikan dan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sehingga program penuntasan wajib belajar sembilan tahun dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Nico, 2007, *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, Malang: Bayumedia Publishing
- Agustina, Dwi Farida, 2008. *Peran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan agama Islam di MTs Negeri Mojokerto dan MTs Miftahul Ulum Ngoro Jombang*. Skripsi (dipublikasikan). Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Al-Qur'an dan Terjemah. 2010. Jakarta: Darus Sunnah
- Asmani, Jamal Ma'ruf, 2012. *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*, Jogjakarta: DIVA Press
- Boy, Denny dan Hotniar Siringoringo, 2009, "Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid", *jurnal Ekonomi Bisnis* No. 12 Vol. 14, Agustus 2009
- <http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/definisi-pengertian-akuntabilitas-konsep.html> diakses Rabu, 16 November 2017, 13:26 di Malang
- <https://tafsirq.com/28-al-qasas/ayat-26> diakses Rabu, 16 November 2017, 13:26 di Malang
- Krisnayanti dan Ida Ayu Putu Ari, 2014, "*Analisis Persepsi Stakeholder Internal Dan Eksternal Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Banjar Tahun 2013*", Vol: 4 No. 1 Tahun: 2014
- Kompri. 2014, *Manajemen Sekolah Teori & Praktek*, Bandung: Alfabeta
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Minarti, Sri, 2011, *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta : Az-Ruzz Media

Ma'mur, Jamal Asmani. 2012. *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. Jogjakarta: DIVA Press

Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Pidarta, Made. 2005. *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem*. Jakarta:Asri Mahasatya.

Prestiana, Kartika Eva. 2015. *Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam kegiatan dan anggaran Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Gugus Sari Kelapa Kecamatan cilongok*. Skripsi (dipublikasikan) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang

Suyanto, Slamet. 2005. *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta : Hikayat Publishing

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Umiarso dan Imam Gojali. 2010. *Manajemen Mutu Sekolah*, Jogjakarta: IRCiSoD

Wibowo, Agus. 2013. *Akuntabilitas Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Widilestariningtiyas, Ony dan Irvan Permana, "*Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*", Universitas Komputer Indonesia diakses pada Rabu, 01 November 2017 12.51

LAMPIRAN 1: INSTRUMEN WAWANCARA

1. Apakah sekolah membuat RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)?
 - a. Kapan RKAS dibuat?
 - b. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan RKAS?
 - c. Bagaimana proses pembuatan RKAS?
2. Bagaimana alur / prosedur untuk mendapatkan dana BOS?
3. Apakah ada syarat tertentu untuk mendapatkan Dana BOS?
4. Kapan Dana BOS dicairkan?
5. Berapa besar dana yang diberikan terhadap setiap sekolah?
6. Bagaimana perhitungannya?
7. Apakah penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan juknis?

Akuntabilitas

1. Apakah ada SOP dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan Dana BOS?
2. Bagaimana cara pelaksanaan akuntabilitas dana BOS?
3. Kapan pelaksanaannya?
4. Kepada siapa pertanggungjawaban Dana BOS di sampaikan?
5. Siapa saja yang terlibat dalam pertanggungjawaban tersebut?
6. Apakah hanya Dana BOS yang menerapkan prinsip akuntabilitas ?
7. Apakah pihak sekolah mendokumentasikan (membukukan) setiap penggunaan anggaran sekolah?
8. Apa alasan sekolah menerapkan akuntabilitas dan transparansi dana BOS?
9. Apakah ada manfaat bagi sekolah yang menerapkan akuntabilitas dan transparansi dana BOS?
10. Apakah pihak sekolah memiliki lembaga audit/auditor?
 - a. Kapan audit keuangan dilaksanakan?
 - b. Bagaimana proses dalam mengaudit keuangan di sekolah?
 - c. Siapa yang berhak menerima hasil audit keuangan sekolah?

Transparansi

1. Apakah sekolah memiliki keterbukaan dalam proses perencanaan anggaran sekolah kepada stakeholders internal (Komite, guru, dan staff) dan eksternal (Pemerintah, orang tua, dan masyarakat), seperti apa?
2. Apakah sekolah memiliki keterbukaan dalam proses pelaksanaan (penggunaan) anggaran sekolah kepada stakeholders internal dan eksternal, seperti apa?
3. Apakah sekolah memiliki keterbukaan dalam proses evaluasi anggaran sekolah kepada stakeholders internal dan eksternal, seperti apa?
4. Apakah pihak sekolah mengumumkan setiap kebijakan anggaran sekolah

- kepada stakeholders internal dan eksternal, dan seperti apa contoh kebijakan anggaran sekolah?
- a. Kapan pengumuman tersebut diberikan?
 - b. Melalui media apa pengumuman tersebut diberikan?
5. Apakah pihak sekolah mempublikasikan setiap hasil laporan anggaran sekolah yang telah di audit (evaluasi) kepada stakeholders internal dan eksternal?
 6. Bagaimana cara pihak sekolah mempublikasikan setiap hasil laporan anggaran sekolah kepada stakeholders internal dan eksternal?
 7. Apakah dengan adanya transparansi pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) keuangan sekolah dapat meningkatkan partisipasi stakeholders internal dan eksternal terhadap penyelenggaraan program/kegiatan sekolah, contohnya?
 8. Kepada siapa transparansi Dana BOS di sampaikan?
 9. Apakah hanya Dana BOS yang menerapkan prinsip transparansi ?



LAMPIRAN 2:LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS PER-TRIWULAN

**REKAPITULASI REALISASI
PENGGUNAAN DANA BOS 2017
SMP NEGERI 3 MALANG**



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN**

SMP NEGERI 3

Jl. Dr. Cipto 20 Telp. (0341) 362612 MALANG

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
 PERIODE TANGGAL : JANUARI s.d. MARET 2017 (TB. I)
 TAHUN 2017

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Malang
 Desa/Kecamatan : Kec. Klojen
 Kabupaten/Kota : Kota Malang
 Provinsi : Jawa Timur

No. Urut	Program/Kegiatan	Pengembangan Perputakaan	Kegiatan Penerimaan Siswa Baru	Kegiatan Pembelajaran dan Evaluasi Siswa	Kegiatan Pembelajaran dan Evaluasi Pembelajaran	Langganan Doya dan Jasa	Perawatan Sekolah	Pembayaran Honorarium Baktiwan	Proyeksi dan Pengembangan Manajemen Sekolah	Pembayaran Penghasilan Sekolah	Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer	Biaya Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Saldo Awal (Periode sebelumnya)												Rp 4.575.000,00
1.2	Pengembangan sarana dan prasarana												Rp -
1.3	Pengembangan standar isi												Rp 4.350.000,00
1.4	Pengembangan standar proses												Rp 180.000,00
1.5	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah						Rp 54.582.350,00				Rp 1.775.000,00	Rp 4.833.000,00	Rp 60.970.350,00
1.6	Pengembangan standar pembelajaran												Rp -
1.7	Pengembangan standar pembiayaan	Rp 4.166.450,00				Rp 17.125.500,00		Rp 37.110.000,00		Rp 20.354.400,00			Rp 75.616.750,00
1.8	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian												Rp 2.578.300,00
	TOTAL	Rp 4.166.450,00		Rp 4.575.000,00	Rp 2.578.300,00	Rp 17.125.500,00	Rp 54.582.350,00	Rp 37.110.000,00	Rp 4.350.000,00	Rp 20.354.400,00	Rp 1.775.000,00	Rp 4.833.000,00	Rp 131.320.500,00

Mengetahui,
 Kepala Sekolah

Drs. Tutut Sri Wahyuni, M.M.Pd.
 NIP. 19841005 198503 2 008

Keterangan
 Saldo Periode sebelumnya
 Total dana BOS periode ini
 Saldo BOS Periode ini

Rp
 Rp 185.200.000,00
 Rp 13.879.500,00

Melangi, 31 Maret 2017
 Bendahara

Dra. Ida Murliawati
 NIP. 19590410 198503 2 005

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
 PERIODE TANGGAL : APRIL - JUNI 2017 (TB. II)
 TAHUN 2017

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Malang
 Desa/Kecamatan : Kec. Klojen
 Kabupaten/Kota : Kota Malang
 Provinsi : Jawa Timur

No. Urut	Program/Kegiatan	Penggunaan Dana BOS													Jumlah
		Pengembangan Penerimaan Siswa Baru	Kegiatan Pembelian dari Eksternal Siswa	Evaluasi Pembelajaran	Langganan Daya dan Jasa	Perawatan Sekolah	Pembayaran Honorarium Baktiwan	Pembinaan profesional Guru & Tenik serta Pengembangan Manajemen Sekolah	Pembayaran Penghasilan Sektoral	Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer	Biaya Lainnya				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.1	Saldo Awal (Periode sebelumnya)														
1.2	Pengembangan kompetensi lulusan			Rp 6.585.000,00									Rp 6.585.000,00		
1.3	Pengembangan standar isi												Rp -		
1.4	Pengembangan standar proses												Rp -		
1.5	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan								Rp 540.000,00				Rp 540.000,00		
1.6	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah												Rp 6.470.000,00		
1.7	Pengembangan standar pembiayaan	Rp 6.239.000,00											Rp 6.239.000,00		
1.8	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian												Rp -		
	TOTAL	Rp 6.239.000,00		Rp 6.585.000,00	Rp 16.121.700,00	Rp 20.173.800,00	Rp 6.470.000,00	Rp 37.110.000,00	Rp 540.000,00	Rp 13.566.000,00			Rp 106.895.800,00		

Mengetahui,
 Kepala Sekolah

Dra. Tutut Sri Wahyuni, M.M.Pd.
 NIP. 19641005 198903 2 009

Keterangan :
 Saldo Periode sebelumnya Rp 13.879.500,00
 Total dana BOS periode ini Rp 330.400.000,00
 Saldo BOS Periode ini Rp 237.473.700,00

Melang, 30 Juni 2017
 Bendahara

Dra. Ida Mudawati
 NIP. 19690410 198603 2 005

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
 PERIODE TANGGAL : OKTOBER - DESEMBER 2017 (TB. IV)
 TAHUN 2017

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Malang
 Kecamatan : Kls. Klo
 Kabupaten/Kota : Kota Malang
 Provinsi : Jawa Timur

No. Urut	Program/Kegiatan	Penggunaan Dana BOS													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pengembangan Perencanaan	Kegiatan Pemertan Sinar Baru	Kegiatan Pemertan dan Ekstasi Sinar	Evaluasi Pembelajaran	Langganan Daya dan Jasa	Perawatan Sekolah	Pembayaran Honorarium Bulanan	Pembayaran pada Guru & Tenaga kependidikan	Pembayaran Penghasilan Sekolah	Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer	Biaya Lainnya	Jumlah		
1	Saldo Awal (Periode sebelumnya)														
1.1	Pengembangan kompetensi lulusan														
1.2	Pengembangan standar isi														
1.3	Pengembangan standar proses														
1.4	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan														
1.5	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah														
1.6	Pengembangan standar pengabdian														
1.7	Pengembangan standar pembiayaan														
1.8	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian														
	TOTAL														

Keterangan :
 Saldo Periode sebelumnya Rp 165.208.300,00
 Total dana BOS Periode ini Rp 375.000.000,00
 Saldo BOS Periode ini Rp

Melang, 30 Desember 2017
 Bendahara

Drs. Ida Muliawati
 NIP. 19590410 198003 2 005

Mengelola,
 Kepala Sekolah

Drs. Tutut Sri Wehyuni, M.W Pd.
 NIP. 1964-1005 198903 2 009

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
 PERIODE TANGGAL : JANUARI - DESEMBER 2017 (TB. I - IV)
 TAHUN 2017

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Malang
 Desa/Kecamatan : Kec. Klojen
 Kabupaten/Kota : Kota Malang
 Provinsi : Jawa Timur

No. Urut	Program/Kegiatan	Penggunaan Dana BOS															
		Pengembangan Perpusustakaan	Kegiatan Penerimaan Siswa Baru	Kegiatan Pembelajaran dan Ekskul Siswa	Evaluasi Pembelajaran	Layanan Daya dan Jasa	Perawatan Sekolah	Pembayaran Honorarium Buletin	Pengembangan profil dan website Pengorganisasian Manajemen Sekolah	Pembayaran Pengelolaan Sekolah	Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer	Biaya Lainnya	Jumlah				
1	2																
1.1	Saldo Awal (Periode sebelumnya)																
1.2	Pengembangan kompetensi lulusan																
1.3	Pengembangan standar proses	Rp 92.427.000,00															
1.4	Pengembangan standar tenaga kependidikan																
1.5	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah																
1.6	Pengembangan standar pengelolaan																
1.7	Pengembangan standar pembiayaan	Rp 25.111.450,00	Rp 6.115.000,00	Rp 23.990.000,00	Rp 3.389.500,00	Rp 88.039.200,00	Rp 128.340.000,00	Rp 62.604.950,00									
1.8	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	Rp 138.539.050,00	Rp 6.115.000,00	Rp 44.710.500,00	Rp 22.098.800,00	Rp 206.599.000,00	Rp 131.642.000,00	Rp 37.265.500,00									
	TOTAL																

Keterangan :
 Saldo Periode sebelumnya Rp 165.208.300,00
 Total dana BOS Periode ini Rp 175.000.000,00
 Saldo BOS Periode ini Rp

Mengetahui,
 Kepala Sekolah

Malang, 30 Desember 2017
 Bendahara

Dra. Tutut Sri Wahyuni, M.M.Pd.
 NIP. 19641005 198903 2 009

Dra. Ida Muliawati
 NIP. 19590410 198503 2 005

LAMPIRAN 3: DOKUMENTASI

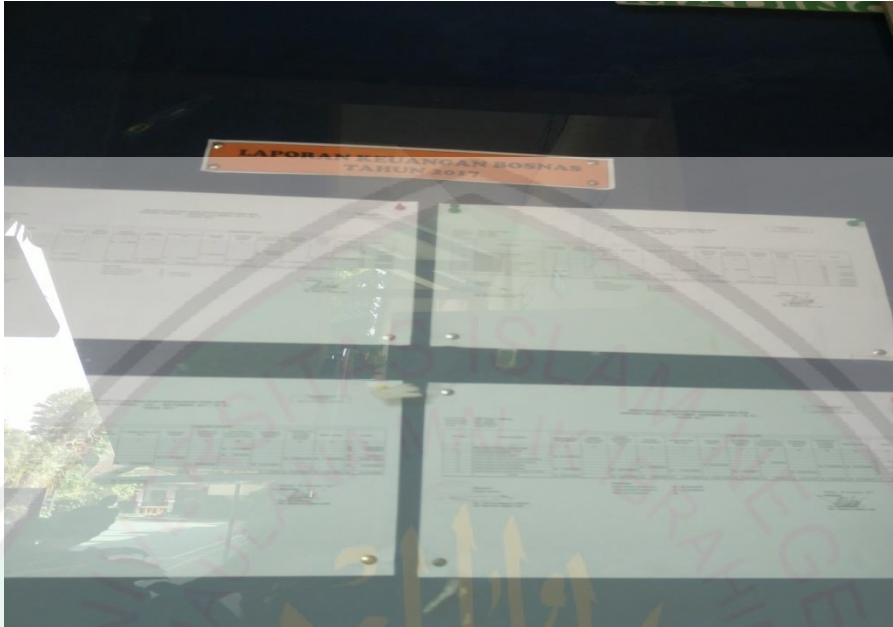


Foto Transparansi Laporan Keuangan

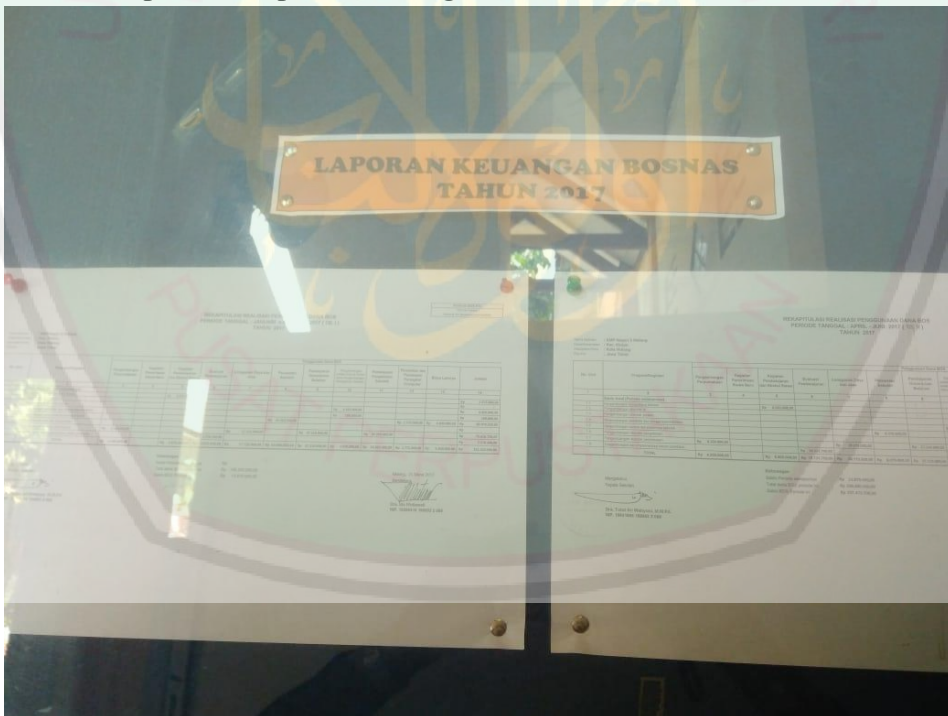


Foto Transparansi Laporan Keuangan



Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 3 Malang



Peneliti melakukan wawancara dengan Bendahara SMPN 3 Malang

LAMPIRAN 4: BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
 Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang
 http://ftk.uin-malang.ac.id/ email :ftk@uin-malang.ac.id

**BUKTI KONSULTASI SKRIPSI
 JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM**

Nama : Umi Nur Lailia
 NIM : 14170022
 Judul : Analisis Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana
 Bantuan Operasional Sekolah dalam Peningkatan Mutu
 Sekolah di SMPN 3 Malang
 Dosen Pembimbing : Agus Mulyono, M.Pd

No.	Tgl/ Bln/ Thn	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing Skripsi
1.	2 Juli 2018	BAB I (Latar Belakang)	
2.	6 Juli 2018	BAB II. (Teori)	
3.	10 Juli 2018	BAB III (Jenis Penelitian)	
4.	13 Juli 2018	Hasil Wawancara	
5.	16 Juli 2018	BAB IV	
6.	18 Juli 2018	Pembahasan Hasil	
7.	20 Juli 2018	BAB V	
8.	23 Juli 2018	BAB VI	
9.	24 Juli 2018	Abstrak	
10.			

Malang, 27 Juli 2018

Mengetahui
 Ketua Jurusan MPI,

Dr. H. Mulyono, MA.
 NIP. 19660626 200501 1 003



LAMPIRAN 5: SURAT PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang http:// fitk.uin-malang.ac.id . email : fitk@uin_malang.ac.id	
Nomor	: 370 /Un.03.1/TL.00.1/03/2018	05 Maret 2018
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Penelitian	
Kepada Yth. Kepala SMP Negeri 3 Malang di Malang		
Assalamu'alaikum Wr. Wb.		
Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:		
Nama	: Umi Nur Lailia	
NIM	: 14170022	
Jurusan	: Manajemen Pendidikan Islam (MPI)	
Semester - Tahun Akademik	: Genap - 2017/2018	
Judul Skripsi	: Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Peningkatan Mutu Sekolah di SMP Negeri 3 Malang	
Lama Penelitian	: Maret 2018 sampai dengan Mei 2018 (3 bulan)	
diberi izin untuk melakukan penelitian di lembaga/instansi yang menjadi wewenang Bapak/Ibu.		
Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik disampaikan terima kasih.		
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.		
 Dekan Agus Maimun, M.Pd N. P. 19650817 199803 1 003		
Tembusan :		
1. Yth. Ketua Jurusan MPI		
2. Arsip		



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 560946, Fax. (0341) 551333
Website : <http://diknas.malangkota.go.id> | Email : disdik_mlg@yahoo.co.id
Kode POS : Malang 65145

REKOMENDASI

Nomor : 074 / 0391 / 35.73.301 / 2018

Menunjuk surat dari Kepala BAKESBANGPOL Kota Malang tanggal 13 Maret 2018 Nomor 072/222.03.P/35.73.406/2018 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian, maka dengan ini kami berikan ijin untuk melaksanakan kegiatan dimaksud kepada :

1. Nama : Umi Nur Lailia
2. NIM : 14170022
3. Jenjang : S1
4. Prodi. / Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
5. Tempat Pelaksanaan : SMP Negeri 3 Malang
6. Waktu Pelaksanaan : Maret s.d Agustus 2018
7. Judul : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Peningkatan Mutu Sekolah di SMPN 3 Malang

Dengan Ketentuan :

1. Dikoordinasikan sebaik – baiknya dengan Kepala Sekolah / Kepala Bidang;
2. Tidak Mengganggu kegiatan;
3. Berlaku selama tidak menyimpang dari peraturan;
4. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
5. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
6. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Selesai melaksanakan penelitian / Observasi / KKL / KKN, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Malang, 15 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan,

Sekretaris



Drs. TOJOK KASianto

Pembina Tk I/IVb

NIP.19650410 198910 1 003

Tembusan :
Yth Sdr.

1. Kepala SMP Negeri 3 Malang



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 3
(JUNIOR HIGH SCHOOL)



Jalan Dr. Cipto 20 Telp. (0341) 362612 Malang 65111
Website : [http / www.smpn3-mlg.sch.id](http://www.smpn3-mlg.sch.id) E - mail : [smpn3mlg @ smpn3 - mlg.sch.id](mailto:smpn3mlg@smpn3-mlg.sch.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 074/318/35.73.301.02.003/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 3 Malang, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Umi Nur Lailia
NIM : 14170022
Jurusan / Program : Manajemen Pendidikan Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian skripsi dengan judul : **"Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Peningkatan Mutu Sekolah di SMPN 3 Malang"** pada Maret - Juli 2018 di SMP Negeri 3 Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 6 Juli 2018

Kepala Sekolah,



Dra. TUTUT SRI WAHYUNI, M.M.Pd

Pembina Tk. I

NIP 19641005 198903 2 009

LAMPIRAN 6: BIODATA MAHASISWA

Nama : Umi Nur Lailia
NIM : 14170022
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 25 Maret 1996
Fak./ Jur. /Prog. Studi : FITK/ Manajemen Pendidikan Islam
Tahun Masuk : 2014
Alamat Rumah : jl. Puskesmas sugio rt: 03 rw: 01
Sugio - Lamongan
No. Tlp Rumah/ Hp : 085646441254
Alamat email : lila250396@gmail.com
Riwayat pendidikan :
3. TK Muslimat Nu Sugio
4. SDN Sugio 1
5. MTsN Tambakberas Jombang
6. MAN Tambakberas Jombang

Malang, 24 Juli 2018
Mahasiswa,

Umi Nur Lailia
NIM. 14170022